

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata *empowerment* mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersamaan dengan istilah pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan (Mardikanto, 2010).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Keberhasilan suatu pemberdayaan adalah sebagai sebuah proses, dan makna pemberdayaan adalah sebagai tujuan. Sebagai suatu tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat atau individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Suharto, 2010)

Kemiskinan merupakan masalah yang upaya penanggulangannya menjadi penting, karena penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96 persen (BPS 2012). Karena itu,

mengacu pada paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable* (Chambers, 1995), maka upaya pemberdayaan masyarakat merupakan kebutuhan dalam pembangunan.

A.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Slamet (2000) menyatakan bahwa penyuluhan sebagai proses pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, karena didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam diri mereka, dan dengan tujuan utama tidak hanya terbatas pada terciptanya "*better farming, better business, dan better living*", tetapi juga untuk memfasilitasi masyarakat (penerima manfaat) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran yang bisa mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya.

Dari pernyataan Slamet tersebut di atas, menyiratkan bahwa keberhasilan penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat adalah terletak pada keinginan yang muncul dari dalam individu itu sendiri, serta keinginan yang didorong oleh adanya pengaruh luar diri individu tersebut, misalnya keberhasilan-keberhasilan masyarakat yang dapat mereka lihat dan saksikan..

Mardikanto (1998) menawarkan penggunaan istilah *edfikasi*, yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Begitu juga Margono Slamet pada seminar penyuluhan pembangunan (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada dasawarsa 1990-an. Penyuluhan sering diartikan sebagai suatu sistem pendidikan bagi masyarakat untuk membuat mereka tahu, mau, dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Penyuluhan sebagai proses pendidikan, memiliki ciri-ciri: (a) penyuluhan adalah sistem pendidikan (di luar sistem sekolah) yang terencana/terprogram, (b) dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan, bahkan dapat dilakukan sambil bekerja (*learning by doing*), (c) tidak terikat waktu, baik penyelenggaraan maupun jangka waktunya, (d) disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, (e) pendidikan dapat berasal dari salah satu anggota peserta didik.

Pengertian penyuluhan yang diutarakan di atas, berarti bahwa penyuluhan itu adalah pendidikan nonformal yang berbeda dengan lazimnya pendidikan formal. Perbedaan tersebut bahwa programnya terencana tetapi disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi, karena itu setiap daerah akan berbeda-beda materinya. Pelaksanaannya juga tidak harus di dalam ruangan, serta waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan waktu kesediaan sasaran.

Menurut UU No. 16 Tahun 2006, tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah: Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup. Jadi, Undang-Undang ini bertujuan agar individu sebagai sasaran dari kegiatan penyuluhan dapat menjadi mandiri dalam berusahatani guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Mardikanto (2010) menyatakan bahwa penyuluhan juga merupakan kegiatan yang ditujukan sebagai proses penguatan kapasitas (*Capacity Strenghtening*). Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki lebih berhasilguna (efektif) dan berdayaguna (efisien) secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti:

- (1) Penyuluhan Sebagai Proses Penyebarluasan Informasi,
- (2) Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan,
- (3) Penyuluhan Sebagai Proses Belajar (Pendidikan Nonformal Luar Sekolah),
- (4) Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan perilaku,
- (5) Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa sosial (*Social Engineering*),
- (6) Penyuluhan Sebagai Proses Pemasaran Sosial (*Social Marketing*),
- (7) Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial,
- (8) Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

Uraian di atas berarti kemampuan masyarakat yang tercapai akan berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efesien) apabila kegiatan penyuluhan dipahami dari delapan poin tersebut di atas sebagai suatu proses kegiatan penyuluhan.

Sejak terbitnya Inpres No. 5/1993 yang dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT), istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. World Bank dalam Bulletinnya Vol. 2 No. 1 dan Vol 11 No. 4 Oktober-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari Strategi Trisula (*three pronged strategy*) untuk memerangi kemiskinan sejak memasuki dasarwarsa 90-an, yang terdiri dari: penggalakan peluang (*promoting opportunity*), fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*), dan peningkatan keamanan (*enhancing security*) (Mardikanto, 2010).

Menurut Mas'ood (1990), pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah *meningkatkan kemampuan dan meningkakan kemandirian* masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan *commit to user*

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Sumodiningrat (1999) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu dan masyarakat dalam membangun keberdayaan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat kekeluargaan, kegotong-royongan, dan keragaman atau kebhinekaan. Jadi, keberdayaan masyarakat yang tinggi dapat dijadikan modal dalam membangun masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Prijono dan Pranarka (1996) mengartikan pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Apabila dilihat lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*). Karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari obyek yang diberdayakan (Mardikanto, 2001).

Robbin (2003) menyatakan bahwa terdapat empat hal penting dalam membangun pemberdayaan anggota suatu organisasi yaitu: (a) Suatu organisasi *commit to user*

harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, (b) Suatu organisasi harus menetapkan penambahan tujuan organisasi secara bersama, (c) Suatu organisasi harus mengikutsertakan anggota dalam menemukan masalah dan cara mengatasinya, (d) Suatu organisasi harus mengembangkan sumber-sumber internal organisasi untuk mendukung adanya perubahan-perubahan berikutnya. Berarti, bahwa dalam membangun pemberdayaan suatu organisasi harus memperhatikan keempat faktor internal kelompok tersebut.

Selanjutnya Coffey, *et al.* (1994) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu kondisi yang memungkinkan orang merasa mampu, memiliki daya berinisiatif dan mampu melaksanakan tugas serta memberikan kekuatan bagi motivasi pribadi. Pemberdayaan dapat berasal dari diri sendiri, dari teman-teman sejawat atau teman sekerja dan dari atasan atau pimpinan. Jadi, pemberdayaan harus dapat menumbuhkan kemampuan untuk berubah ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Kecenderungan pertama bahwa pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini menurut Oakley & Marsden (1984), dapat dilengkapi pula dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang pertama ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau

commit to user

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Paul (1987) *cit.* Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang aktif dan kreatif dengan melihat keterlibatan masyarakat mulai tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pembagian hasil dan evaluasi. Selanjutnya Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah, (3) melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah semakin bertambah lemah atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Berarti, keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan pemberdayaan sangat diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dirasakan fungsi dan manfaatnya.

Dalam pemberdayaan, lembaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin terhadap: organisasi perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik. Bentuk, jenis, dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (*strengthening community*) sangat beragam dan akan terwujud jika ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat (Malik *cit.*

commit to user

Alfian, 1980). Karena itu, usaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan secara hakiki sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, permodalan, teknologi, dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian. Kemampuan itu juga dimotivasi oleh keinginan dari dalam diri dan pengaruh luar individu tersebut untuk berubah ke arah perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan.

A.1.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, (2) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, (3) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) (Mardikanto, 2009).

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan *produktif* dengan tujuan untuk peningkatan

pendapatan (*income generating*). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan.

Mardikanto (2010) menyimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah:

- (1) Perbaikan pendidikan (*better education*). Pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metoda, tempat dan waktu, serta hubungan antara fasilitator dengan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- (2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuhnya semangat belajar seumur hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- (3) Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- (4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan, memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

commit to user

- (5) Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan (kegiatan), dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- (6) Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- (7) Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), kerusakan lingkungan seringkali disebabkan kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- (8) Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- (9) Perbaiki masyarakat (*better community*). Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Memperhatikan kesimpulan Mardikanto tentang tujuan pemberdayaan di atas, maka tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah adanya perubahan dalam hal perbaikan baik secara individu/perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Karsidi (2003) menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya pada kelompok tani dan nelayan tampak bahwa untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dapat ditempuh dengan berbagai upaya berikut: (1) memulai dari tindakan mikro dan lokal, (2) pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal

commit to user

(daerah), (3) mengganti pendekatan wilayah administratif dengan pendekatan kawasan, (4) membangun kembali kelembagaan masyarakat, (5) mengembangkan penguasaan teknis, (6) pengembangan kesadaran dan demokratisasi ekonomi, (7) membangun jaringan ekonomi strategis, dan (8) kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Berarti, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat perlu diupayakan dengan delapan hal yang disebutkan di atas, sehingga kehidupan masyarakat dapat menjadi sejahtera.

Selanjutnya Karsidi (2003) menyatakan bahwa tercapainya tujuan pemberdayaan dapat dilihat dari efektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan, yang diukur dari seberapa jauh terjadi perubahan perilaku sasaran, yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, yang dapat diamati pada: (1) Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan usaha, mencakup macam dan jumlah sarana atau teknik berusahnya, (2) Perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya, (3) Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok, koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh.

Kesimpulan bahwa tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah adanya perubahan dalam hal perbaikan, baik secara individu/perorangan, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan lepas dari ketergantungan dari pihak lain.

A.1.3. Aspek dan Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2010) mengutarakan selain empat aspek yang terdapat dalam definisi pemberdayaan masyarakat, perlu juga memperhatikan sedikitnya empat unsur pokok lainnya, yaitu: (1) aksesibilitas informasi, karena informasi berkaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi,

dan akuntabilitas, (2) keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, (3) akuntabilitas, kaitannya dengan tanggung jawab publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat, (4) kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Macadam (2000) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan judul *From Pushing Production Inputs to Empowering The Community: A Case Study in The Transformation of An Extension Agency*, bahwa proses transformasi merupakan dasar pergeseran paradigma penyuluhan melalui input produksi dan model transfer teknologi pada pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Input produksi dan model transfer teknologi tersebut adalah: (a) kesesuaian dengan situasi luas yang ada, (b) alternatif konsep yang berdasarkan nilai-nilai bersama, (c) informasi fasilitasi teori praktek dalam konteks lokal, (d) petunjuk kapasitas sistem internal dan prosedur untuk menerjemahkan peluang, (e) akses ke sumberdaya yang dibutuhkan. Jadi, kesimpulan penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan dengan baik apabila terjadi pergeseran paradigma penyuluhan melalui input produksi dan transfer teknologi, sehingga perubahan yang direncanakan dapat tercapai.

Jadi, aspek pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai unsur-unsur pemberdayaan dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas

commit to user

pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi aksesibilitas: berbagai sumberdaya, permodalan, teknologi, pasar, informasi, keterlibatan masyarakat sasaran, akuntabilitas, kapasitas organisasi lokal.

A.1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah. *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peranserta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat (Mardikanto, 2010).

Strategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah (*grassroots*) harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional (Sumodiningrat, 1999)

Selanjutnya menurut Suharto (2005), strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras matra pemberdayaan, yaitu:

- (1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas. *commit to user*

(2) Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi. Dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

(3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobyng, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Berbagai masalah yang dialami baik secara individual, kelompok, dalam keluarga, lembaga tertentu atau bahkan bagian masyarakat secara lebih luas, untuk itu ditentukan adanya bimbingan sebagai suatu usaha pemberdayaan atau bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok.

Aras mikro merupakan strategi pemberdayaan yang ditujukan pada masyarakat secara individual (perorangan), seperti bimbingan dan konseling pada individu (klien) untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, menumbuhkan kepercayaan untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat, menyadarkan bahwa dirinya bagian dari

lingkungan sosial budaya, membantu mengembangkan kapasitas diri menggunakan sumberdaya yang ada.

Aras mezzo dimaksudkan strategi pemberdayaan melalui kelompok, untuk membantu sekelompok masyarakat memecahkan masalah-masalah yang dirasakan secara individu tetapi dirasakan juga oleh individu-individu yang lain dalam kelompok. Menumbuhkan kesempatan partisipasi individu dalam perencanaan pemecahan masalah, belajar dan diskusi berkelompok. Kegiatan kelompok merupakan teknik yang baik dalam bimbingan pemberdayaan, karena memberikan kesempatan individu untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya.

Aras makro merupakan tujuan pemberdayaan pada sistem yang lebih luas, yaitu individu-individu, kelompok-kelompok dalam suatu sistem kemasyarakatan. Aras makro merupakan perpaduan antara aras mikro dan aras mezzo dalam suatu sistem yang lebih besar atau luas

Jadi, pendapat Suharto di atas menggambarkan bahwa dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan kemampuan klien dalam memecahkan masalah yang dihadapi, karena itu digunakan aras mikro, mezzo atau makro.

Strategi yang perlu juga dikembangkan adalah tenaga pendamping, sebagai fasilitator pendamping bisa berasal dari Penyuluh pemerintah, Penyuluh swasta atau Penyuluh yang ditugaskan oleh perusahaan. Ada tiga peran penyuluh meliputi: (a) pencairan diri dengan masyarakat sasaran, (b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan, (c) pemantapan dan

pengembangan hubungan yang semakin akrab dengan masyarakat sarannya (Kurt Levin, 1983 *cit.* Mardikanto, 1998).

Ketiga peran tersebut, oleh Lippit, *et al.* (1958) kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa peran yang lebih rinci, dan dikelompokkan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: (a) pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan, (b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, (c) memantapkan dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat sasaran. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan merupakan kegiatan paling awal yang perlu dilakukan oleh setiap penyuluh sebelum melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Tahapan ini dilakukan pada masa orientasi yang mencakup:

(1) Diagnosa masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.

Sebelum melakukan kegiatan setiap penyuluh perlu melakukan kajian tentang beragam masalah atau kebutuhan-kebutuhan nyata (*real need*) yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, agar mereka dapat segera terbebas dari keadaan yang tidak dikehendaki.

(2) Pemilihan obyek perubahan yang tepat.

Pada tahap ini berdasarkan diagnosa yang telah dilakukan penyuluh berusaha mencari atau menemukan obyek-obyek yang strategis melalui kegiatan-kegiatan sederhana yang memiliki peluang tinggi untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakatnya, tidak memerlukan biaya/pengorbanan yang terlalu besar, tetapi sudah cukup memberikan manfaat langsung yang mudah diamati atau dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan tersebut

commit to user

disebut strategis karena akan memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) berupa tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan lanjutan yang lebih besar baik ragam maupun kualitasnya.

(3) Analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing. Karena itu sebelum penyuluh menawarkan kegiatan atau upaya perubahan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus menganalisis tentang motivasi atau faktor-faktor yang mendorongnya untuk siap melakukan perubahan serta kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkannya.

Mengenai pemberdayaan ini, World Bank (2001) memberikan beberapa alternatif dalam fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) yang dapat dilakukan pemerintah, melalui:

- (1) Basis politik dan hukum yang transparan, serta memberikan ruang gerak bagi demokratisasi dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan pemantauan implementasi kegiatan.
- (2) Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan administrasi publik yang bertanggung-gugat (*accountability*) dan responsif terhadap penggunanya.
- (3) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melakukan kontrol terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan. Desentralisasi itu harus

mampu bekerjasama dengan mekanisme lain untuk menggerakkan partisipasi masyarakat serta pemantauan lembaga pemerintah oleh setiap warga negara.

- (4) Menggerakkan kesetaraan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kelembagaan politik.
- (5) Memerangi hambatan sosial (*social barrier*), terutama yang menyangkut bias-bias etnis, rasial, dan gender dalam penegakan hukum.
- (6) Mendukung modal sosial yang dimiliki kelompok miskin, terutama dukungan terciptanya jejaring agar mereka keluar dari kemiskinannya. Dalam hubungan ini, pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin terhadap organisasi perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik.

Dengan demikian, bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator pemberdayaan dengan memberikan dukungan terhadap keenam alternatif di atas, sehingga kelompok masyarakat miskin dapat terangkat kehidupannya.

Fasilitasi dimaksudkan dalam pemberdayaan masyarakat di atas adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Fasilitasi merupakan inti dari pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, dan kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendamping yang dapat dilakukan oleh PPL, PPL swakarsa, PPL swasa, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya (Gunawan, 2003).

Sumaryo (2009) mengutip pernyataan Sumpeno bahwa dalam proses pemberdayaan diperlukan tenaga pendamping (fasilitator) yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu pada masyarakat. Selanjutnya untuk memperoleh hasil optimal dalam pelaksanaan fasilitasi, dapat diterapkan prinsip-prinsip berikut:

- (1) Partisipasi masyarakat, merupakan upaya membangun ikatan yang menekankan pada aspek kemandirian, penyatuan masyarakat sebagai satu kesatuan, dan keyakinan mengenai situasi dan arah perubahan sosial kemasyarakatan.
- (2) Berbasis nilai moral. Pemberdayaan tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bersifat material (pemenuhan pangan, penyediaan lapangan kerja, pendapatan, infrastruktur, dan fasilitas sosial lainnya), namun juga harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan sikap anggota masyarakat.
- (3) Penguatan jejaring sosial. Hal ini dilakukan dengan memperkuat interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring (*networking*). Penguatan jejaring dapat dilakukan melalui pendekatan kerjasama kelembagaan pada semua jenjang dengan dasar kesetaraan, komitmen, dan sinergi (*social trust*) dalam memecahkan masalah dan menemukan solusinya.

Sumpeno (2004) menyatakan ada sepuluh hal yang perlu diperhatikan agar pendampingan berjalan efektif, yaitu: (1) menghayati kebutuhan masyarakat, (2) menyadari kekuatan diri, (3) bekerja dengan penuh tanggungjawab, (4) menikmati tugas, (5) kebanggaan atas kinerja, (6) menyesuaikan diri, (7) menetapkan prioritas, (8) berkolaborasi, (9) keyakinan yang positif (*possitive believing*), dan *commit to user*

(10) belajar terus. Jadi, menurut Sumpeno bahwa fasilitator atau pendamping dalam proses pemberdayaan harus memiliki kemampuan analisis terhadap kebutuhan, kekuatan, dan etos kerja.

Rogers (1983) mengemukakan adanya tiga hal yang sangat menentukan keberhasilan seorang penyuluh sebagai pendamping, yaitu:

- (1) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menjalin hubungan secara langsung maupun tak langsung (melalui tokoh-tokoh masyarakat, pemuka pendapat, lembaga swadaya masyarakat) dengan masyarakat sasarnya.
- (2) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menjadi perantara antara sumber inovasi (lembaga penelitian/keilmuan, petani maju, pedagang atau konsumen) dengan pemerintah/lembaga penyuluhan dan masyarakat sasarnya. Kemauan dan kemampuan untuk menjadi perantara dalam arti: (a) seberapa jauh penyuluh mampu meyakinkan pemerintah/lembaga penyuluhan bahwa inovasi yang ditawarkan memiliki arti strategis bagi kepentingan masyarakat (peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan) maupun bagi pemerintah (demi stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional), (b) seberapa jauh penyuluh mampu menerjemahkan inovasi menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan (*felt need*) oleh masyarakat sasarnya/petani, (c) seberapa jauh penyuluh mampu bekerja dengan menggunakan pola berpikir pemerintah/lembaga penyuluhan dan pola pikir masyarakat, dan tidak terkungkung untuk bekerja menurut pola pikirnya atau acuannya sendiri.
- (3) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh *commit to user*

pemerintah/lembaga penyuluhan dan masyarakat sarasannya. Erat kaitannya dengan kedua hal di atas, kegiatan penyuluh seringkali masih berupa kebutuhan nyata (*real need*) yang belum tentu merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan (*felt need*) baik oleh pemerintah/lembaga penyuluhan maupun oleh masyarakat sarasannya. Dalam kasus seperti ini upaya yang harus dilakukan oleh penyuluh pertama-tama adalah seberapa jauh ia mampu menerjemahkan kebutuhan nyata yang dilihatnya itu menjadi kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah/lembaga penyuluhan dan masyarakat sarasannya (mengubah "*real need*" menjadi "*felt need*").

Jadi, menurut Rogers bahwa keberhasilan penyuluh sebagai pendamping ditentukan oleh kemauan dan kemampuan berinteraksi dan mengkomunikasikan serta menyesuaikan kebutuhan dan keinginan yang dirasakan lembaga penyuluh dan masyarakat.

A.1.5. Lingkup Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Mardikanto menambahkan Bina Kelembagaan, karena ketiga

Bina yang dikemukakan Sumadyo itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan. Keempat upaya pokok tersebut merupakan lingkup kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang dijelaskan berikut ini:

- (1) Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Selain itu, bahwa manusia adalah salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelolaan manajemen itu sendiri. Termasuk dalam upaya Bina Manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas, yaitu:
 - (a) pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
 - (b) Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi: Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi; kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi; proses organisasi atau pengelolaan organisasi; pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya; interaksi antar individu di dalam organisasi; interaksi entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
 - (c) Pengembangan kapasitas sistem (Jejaring), yang meliputi: pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama, dan pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

- (2) Bina Usaha, merupakan suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan bagi kesejahteraan tidak akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina Usaha mencakup: (a) Pemilihan komoditas dan jenis usaha, (b) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis, (c) Pembentukan Badan Usaha, (d) Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, (e) Pengelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir, (f) Manajemen produksi dan operasi, (g) Manajemen logistik dan finansial, (h) Penelitian dan pengembangan, (i) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, (j) Pengembangan jejaring dan kemitraan, (k) Pengembangan sarana dan prasana pendukung.
- (3) Bina Lingkungan. Pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi, terutama yang terkait dengan tersedianya bahan baku. Dalam prakteknya perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan/areal kerja, maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penanaman modal/perseroan, dan yang termasuk tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

(4) Bina Kelembagaan. Tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Pengertian lembaga yang dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi (1981), adalah sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu: *social institution* atau pranata sosial dan *social organization* atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen berikut, yaitu:

- (a) komponen person, orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- (b) Komponen kepentingan, orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga mereka harus saling berinteraksi.
- (c) Komponen aturan, setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- (d) Komponen struktur, setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang tidak bisa mengubah-ubah posisinya dengan kemaun sendiri.

Terkait Bina Kelembagaan dengan kegiatan agribisnis, Mosher (1969), menyatakan bahwa untuk membangun struktur pedesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan: (1) sarana produksi dan peralatan pertanian, (2) kredit produksi, (3) pemasaran produksi, (4) percobaan/pengujian

commit to user

lokal, (5) penyuluhan, dan (6) transportasi. Lebih lanjut, Syahyuti, 1997 *cit.* Mardikanto, 2010 menyatakan bahwa pentingnya delapan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis yaitu: (1) Kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) Kelembagaan penyediaan permodalan, (3) Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) Kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) Kelembagaan usahatani, (6) Kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) Kelembagaan pemasaran hasil pertanian, (8) Kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dan lainnya).

Dari uraian di atas, pemberdayaan tidak cukup dilakukan terbatas pada upaya “bina manusia” tanpa diikuti oleh upaya “bina usaha” dalam arti untuk memberikan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik. Tanpa itu bina manusia akan membuat masyarakat jemu bahkan menumbuhkan kekecewaan yang berakibat pada skeptisme (ketidakpercayaan) terhadap program/kegiatan pemberdayaan berikutnya. Selain itu juga bina usaha perlu dibarengi “bina lingkungan” baik yang berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Tanpa itu bina manusia dan bina usaha dapat mengarah pada perusakan lingkungan, yang berakibat buruk atau mengancam keberlanjutan manusia dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat juga perlu melakukan bina kelembagaan terutama lembaga yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha masyarakat tersebut, karena baik bina manusia, bina usaha, maupun bina lingkungan memerlukan layanan dan dukungan kelembagaan yang efektif baik dalam bentuk pengorganisasian, jaminan dan kepastian hukum/peraturan, nilai-nilai sosial atau budaya. Indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

commit to user

Tabel 2.1: Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup Kegiatan	Indikator
Bina Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kapasitas kepribadian masyarakat - Pengembangan kapasitas di dunia usaha - Pengembangan kapasitas keprofesionalan
Bina Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan komoditas dan jenis usaha - Status kelayakan dan perencanaan bisnis - Pembentukan badan usaha milik masyarakat - Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan bidang usaha - Pengelolaan SDM dan pengembangan karir - Manajemen produksi dan operasi - Manajemen logistik dan finansial - Penelitian dan pengembangan bidang usaha - Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis berbagai bidang usaha - Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bidang usaha
Bina Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan fisik - Kepedulian dan kesetiakawanan sosial - Akulturasi dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal
Bina Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan ekonomi masyarakat - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan sosial - Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan tradisional

Sumber: Mardikanto (2010).

Mardikanto (2010) mengemukakan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan, (2) frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan, (3) tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan, (4) jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang

commit to user

ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program, (5) jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan, (6) intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah, (7) meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat, (8) berkurangnya masyarakat yang menderita kelaparan, (9) meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup, (10) meningkatnya kemandirian masyarakat.

Pendapat Mardikanto terhadap indikator keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di atas menunjukkan bahwa tujuan program pemberdayaan akan tercapai apabila program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi termotivasi untuk berpartisipasi mengikuti semua proses kegiatan, dan memudahkan untuk mencari solusi jika terjadi masalah dalam proses pelaksanaan program.

A.2. Kemiskinan

Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti menyangkut masalah kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan merupakan target pertama MDGs, yaitu menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mencapai tujuan MDGs tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama serta pemahanan dan komitmen dari para *stakeholders*, seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta). Atas dasar hal ini maka berikut ini perlu dibahas konsep kemiskinan berdasarkan pengertian, dimensi, penyebab, ragam, pengukuran, dan usaha penanggulangan kemiskinan. *commit to user*

A.2.1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut istilah umum adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki, seperti; makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Bayo, 1996).

Sumodiningrat (1999) mengutip definisi kemiskinan oleh Bank Dunia sebagai: *Poverty is concern with absolute standart of living of part of society the poor society*. Artinya kemiskinan adalah terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin. Kemiskinan dapat diukur melalui perbandingan antara tingkat pendapatan dengan nilai kebutuhan hidup minimum seseorang pada kurun waktu tertentu. Definisi kemiskinan ini mengharuskan untuk memperhatikan batas absolut standar hidup, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seseorang yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Salim (2002) menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sedangkan menurut Clarence, *et al.* (1979), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen

sosial dan moral. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Belakangan ini pengertian kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (Smeru, 2001).

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (BAPPENAS 2004).

Definisi lainnya, bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, basis tersebut meliputi: (1) modal yang produktif atau asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, (2) sumber-sumber keuangan, misalnya pendapatan dan kredit yang memadai, (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, misalnya partai politik, kelompok sosial, koperasi, (4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, (5) pengetahuan dan keterampilan yang memadai, (6) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan (Friedman, 1979). Selanjutnya bahwa kemiskinan di negara berkembang berarti

commit to user

kelaparan, kekurangan gizi, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar (Ghose dan Griffin, 1980)

Menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (2002), kemiskinan adalah keadaan tidak tercukupinya atau tidak mampu makan 2 kali sehari; tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian; bagian tertentu dari rumah berlantai tanah; dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan, sedangkan BPS (1994) mengartikan kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.

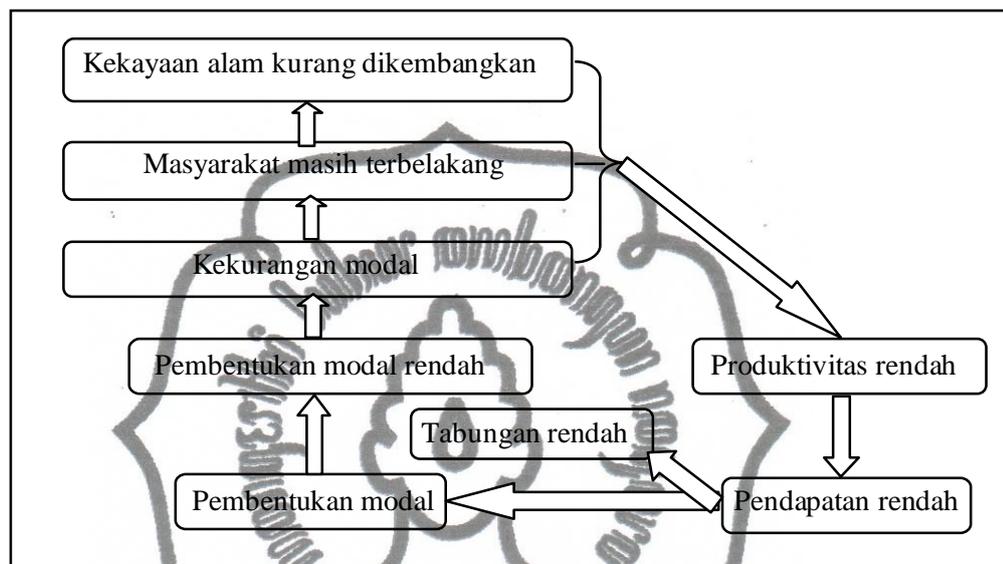
Asean Development Bank (1999) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketiadaan aset-aset dan kesempatan esensial yang menjadi hak setiap manusia. Setiap orang harus mempunyai akses pada pendidikan dasar dan rawatan kesehatan primer. Rumah tangga miskin mempunyai hak untuk menunjang hidupnya dengan jerih payahnya sendiri, dan mendapat imbalan yang memadai, serta mempunyai perlindungan terhadap gangguan mendadak dari luar. Selain pendapatan dan layanan dasar, individu-individu dan masyarakat juga menjadi miskin jika mereka tidak diberdayakan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka. Kemiskinan lebih baik diukur dengan ukuran: pendidikan dasar, rawatan kesehatan, gizi, air bersih, dan sanitasi; di samping pendapatan, pekerjaan, dan upah. Ukuran ini harus digunakan untuk mewakili hal yang tidak berwujud, seperti rasa ketidakberdayaan dan ketiadaan

kebebasan untuk berpartisipasi. Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan pendapatan \$ 1 perhari.

Chambers (1995) menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari 5 unsur, yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini saling berkaitan satu sama lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang miskin. Dari kelima unsur ini, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian utama. Kerentanan, menurut Chambers dapat di lihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam, gagal panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin tersebut, sedangkan ketidakberdayaan sering menimbulkan *poverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda atau asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya. Kedua jenis ketidakberuntungan ini sering menjadi penyebab keluarga miskin menjadi lebih miskin.

Meier dan Bardwin, 1969 *cit.* Sukirno, 2006 menyatakan bahwa perangkap kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang atau tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Untuk itu perlu pengembangan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan *commit to user*

melaksanakan berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi. Hubungan perangkap penyebab kemiskinan dari gabungan berbagai teori oleh para ahli di atas dapat dilihat dalam Gambar 2.1. berikut:



Gambar 2.1: Hubungan ketiga perangkap kemiskinan

Jika dihubungkan dan disimpulkan mengenai penghambatan pembangunan yang diuraikan di atas, maka pada hakekatnya teori lingkaran perangkap kemiskinan berpendapat tentang adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya rangsangan melakukan penanaman modal, dan rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan atau kemahiran masyarakat.

Karena itu, bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (*strengthening community*) sangat beragam, yang hanya berwujud jika ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat (Adam Malik, *cit.* Alfian, 1980). Usaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah yang bersifat *instant* (segera dapat dilihat hasilnya). Pengalaman menunjukkan, upaya pengentasan kemiskinan sering menghadapi kendala besar berupa:

- (1) Usaha-usaha untuk menghambat kegiatan membela orang kecil atau orang miskin, yaitu: (a) lemahnya komitmen (khususnya) aparat pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin, (b) rendahnya kepedulian untuk memperhatikan orang miskin, (c) ketidakmampuan memahami kehidupan orang miskin, terutama yang terkait dengan persepsi dan asumsi tentang “karakteristik” orang miskin.
- (2) Kendala yang ada di (lingkungan) orang miskin, yaitu: (a) kendala fisik alamiah, yang menyangkut kondisi sumberdaya alam tempat mereka tinggal, seperti: kesuburan lahan, rawan bencana alam, dan lain sebagainya, (b) kendala struktural yang bersumber (terutama) pada struktur sosial dalam masyarakatnya; dan kendala kultural yang (seolah-olah) menyerah terhadap nasib (Alfian, 1980).

A.2.2. Ragam, Dimensi, dan Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar, hal inilah yang disebut dengan kemiskinan absolut. Sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan pada akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki disebut dengan kemiskinan struktural yaitu ketidakterjangkauan akses terhadap sumber ekonomi.

Kartasmita (1993) mengemukakan ada tiga jenis kemiskinan yaitu:

- (1) Kemiskinan Natural/Alamiah, adalah kemiskinan disebabkan oleh keterbatasan aset alam (*natural asset*) yang menyebabkan petani tanaman

pangan miskin seperti tanah tandus, tidak memiliki sumberdaya alam maupun disebabkan oleh faktor-faktor alam lainya diluar kemampuan manusia.

- (2) Kemiskinan Struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat tertentu cenderung mengalami kemiskinan karena kondisi struktur ekonominya rendah dan menyebabkan keterbatasan aset sosial (*social asset*), aset manusia (*human asset*), aset finansial (*financial asset*), dan aset fisik (*physical asset*).
- (3) Kemiskinan Kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan aset budaya (*cultural asset*) di dalam masyarakat tersebut seperti adanya perbedaan pola kerja, malas, sikap fatalis, dan apatis.

Nasikun (dalam www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32htm_47k 2008) mengelompokkan kemiskinan dalam empat bentuk yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Keempat bentuk tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

- (1) Kemiskinan absolut, yaitu apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- (2) Kemiskinan relatif, yaitu miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- (3) Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan hidup seseorang atau memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif walaupun ada bantuan dari luar.

- (4) Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sistem sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selanjutnya Kartasmita (1993) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya empat penyebab kemiskinan, yaitu:

- (1) Rendahnya taraf pendidikan. Tarap pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki.
- (2) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- (3) Terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
- (4) Kondisi keterisolasian. Hidup terpencil menyebabkan mereka sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sumodiningrat (1999) menyatakan beberapa pola kemiskinan, yaitu:

- (1) *Presistent Poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumberdaya alam atau terisolasi.
- (2) *Cyclical Poverty*, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

- (3) *Seasonal Poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
- (4) *Accidental Poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dimensi kemiskinan oleh David Cox (2004), meliputi antara lain:

- (1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara seringkali terpinggirkan oleh persaingan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- (2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- (3) Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- (4) Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Soerjadi, *et al.* (1987) membedakan kemiskinan dalam 3 macam jenis yaitu:

- (1) Kemiskinan relatif, yaitu menurut perbandingan kelas pendapatan.
- (2) Kemiskinan subjektif, yaitu menurut perasaan perorang, dan

commit to user

(3) Kemiskinan absolut, yaitu bila tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan-nya untuk dapat memenuhi keperluan yang mendasar, sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu. Dari semua keperluan dasar (antara lain pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan), yang paling pokok dan yang memerlukan upaya untuk memperolehnya adalah pangan.

Mafruhah (2010) menyimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

- (1) Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal.
- (2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- (3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- (4) Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- (5) Adanya perbedaan sumberdaya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- (6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- (7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya.
- (8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
- (9) Pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Kenyataan tersebut juga didukung oleh suara mereka yang miskin (*Voice of the poor*), menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh:

- (1) Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk: (a) modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan, dan kesehatan yang memadai, (b) modal produksi, misalnya lahan dan akses terhadap kredit, (c) modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik. Sarana fisik, misalnya akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik.
- (2) Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi guncangan-guncangan karena: (a) krisis ekonomi, (b) kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan, (c) kehilangan pekerjaan (PHK), (d) konflik sosial dan politik, (e) korban kekerasan sosial dan rumah tangga, (f) bencana alam, (g) musibah (jatuh sakit, kebakaran, kecurian), (h) tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat, (i) tidak adanya kepastian hukum, (j) tidak adanya perlindungan dari kejahatan, (k) kesewenang-wenangan aparat, (l) ancaman dan intimidasi, (m) kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, (n) rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

Jadi, menurut Mafruhah di atas, penyebab kemiskinan itu sangat kompleks, mulai dari keterbatasan yang ada pada individu yang bersangkutan, faktor eksternal baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Lebih lanjut Mafruhah (2010) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Sebagai suatu masalah, kemiskinan mempunyai beberapa dimensi yang patut diketahui dan dikaji kebenarannya. *Pertama, commit to user*

kemiskinan itu multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berujud miskin akan aset-aset organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. **Kedua**, aspek-aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung. Ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada suatu aspek berpengaruh pada kemajuan ataupun kemunduran aspek lainnya. **Ketiga**, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik individual maupun kolektif. Secara kualitatif kemiskinan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dan secara kuantitatif, menggunakan tolok ukur ekonomis tertentu, dapat diketahui jumlahnya.

Abrahamson (2007) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan judul *Poverty and welfare in Denmark*, bahwa di Negara Denmark kemiskinan itu muncul berhubungan dengan pengucilan sosial, dan marginalisasi dari pasar tenaga kerja, sedangkan hasil penelitian Philip (2009), dengan judul *Indian Urban Poverty: Where are the Levers for its Effective Alleviation*, bahwa kemiskinan di perkotaan India dapat dikurangi melalui proses pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (termasuk hukum dan ketertiban), menyediakan kesehatan dan pendidikan, serta memperbaiki lingkungan setempat.

A.2.3. Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan adalah rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang disebut dengan garis kemiskinan. Pengukuran garis kemiskinan dengan pendekatan sosial sulit dilakukan, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pengeluaran.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang dijelaskan berikut ini (Arsyad, *cit.* Mafruhah, 2010):

- (1) Kemiskinan Absolut merupakan konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin. Kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
- (2) Kemiskinan Relatif, konsep kemiskinan ini adalah seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Sayogyo (1986) mengukur dan mengklasifikasikan masyarakat miskin yang mengacu pada kebutuhan pokok beras menjadi:

- (1) Miskin, apabila pengeluaran perkapita pertahun lebih rendah dari nilai tukar 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras daerah perkotaan.
- (2) Miskin sekali apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras daerah perkotaan.
- (3) Paling miskin, apabila pengeluaran perkapita pertahun lebih rendah dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah pedesaan dan 270 kg beras daerah perkotaan.

Terakhir menurut BPS (2011), garis kemiskinan terbaru Provinsi Lampung adalah sebesar Rp234.073,- perkapita perbulan, berarti bahwa seorang kepala rumah tangga dengan empat orang anggota minimal harus mempunyai pendapatan sebesar Rp936.292,- perbulan untuk dapat dikatakan melewati garis kemiskinan. Selain menggunakan kebutuhan dasar seseorang setiap bulan, BPS juga mempunyai 14 kriteria khusus seseorang disebut miskin. Keluarga miskin versi BPS tersebut adalah: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² perorang, (2) jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bamboo/kayu murahan, (3) jenis dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, (5) sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik, (6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, (8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, (9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, (10) hanya sanggup makan

satu atau dua kali dalam sehari, (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,- perbulan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya SD, (14) tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500.000,-.

Berdasarkan 14 kriteria BPS tersebut, maka klasifikasi rumah tangga miskin berdasarkan pendapatan perbulan adalah sebagai berikut:

- (1) Katagori sangat miskin, dengan pendapatan maksimal Rp480.000,-
- (2) Katagori miskin , dengan pendapatan Rp480.000,- sampai Rp600.000,-
- (3) Katagori mendekati miskin, pendapatan Rp600.000,- sampai Rp700.000,-

Menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (2007), miskin adalah mereka yang termasuk dalam katagori prasejahtera dan sejahtera I. Ukuran tingkat kesejahteraan rakyat dapat dikelompokkan atas lima tahap yaitu:

- (1) Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu kebutuhan seperti makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian yang berbeda baik di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; rumah memiliki atap, lantai dan dinding baik; bila sakit pergi ke sarana kesehatan bila ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan anak umur 7-15 tahun bersekolah.
- (2) Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan seperti makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian yang berbeda baik di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian; rumah memiliki atap, lantai dan

dinding yang baik; bila sakit pergi ke sarana kesehatan bila ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan anak umur 7-15 tahun bersekolah.

(3) Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Sejahtera I dan ditambah kebutuhan seperti: melaksanakan ibadah agama; makan daging, ikan dan telur seminggu sekali; dapat membeli satu stel pakaian dalam setahun; luas lantai kurang dari 8 untuk setiap penghuni rumah; tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing; salah satu anggota keluarga memiliki pekerjaan atau berpenghasilan; keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis; pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

(4) Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan ditambah kebutuhan seperti: dapat meningkatkan pengetahuan agama; sebagian penghasilan keluarga ditabung; kebiasaan makan bersama minimal seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi; sering ikut kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal; dan memperoleh informais dari surat kabar/majalah/radio/televisi.

(5) Keluarga Sejahtera Plus III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan ditambah kebutuhan seperti: secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial; dan ada yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat.

Berdasarkan ukuran-ukuran kemiskinan ini Amato, and Zuo (2005), menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tingkat kesehatan masyarakat miskin di

perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat miskin di pedesaan, dan tingkat psikologi kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan lebih tinggi daripada masyarakat miskin di perkotaan, serta terdapat hubungan yang signifikan baik kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan dengan jenis kelamin, ras, status keluarga.

A.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Sejak pemerintahan Orde Baru yang mencanangkan program *economic growth development* dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dan sempat mencapai prestasi tetapi belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Program-program tersebut antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA), Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA). Sasaran IDT adalah penduduk miskin yang berada di desa-desa tertinggal, sedangkan TAKESRA dan KUKESRA sasarannya adalah penduduk miskin di luar lokasi desa tertinggal.

Prestasi yang dicapai pemerintah Orde Baru selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I (PJPT I) berupa peningkatan pendapatan perkapita penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah angka kemiskinan. Keberhasilan tersebut tidak bertahan lama, karena pada petengahan PJPT II terjadi krisis moneter yang melipatgandakan jumlah penduduk miskin dan menambah pengangguran. Angka kemiskinan yang pada kurun waktu 27 tahun (1970-1997) telah turun dari 70 juta menjadi 21 juta, kembali meningkat secara spektakuler menjadi 79,4 juta jiwa, dari jumlah tersebut didominasi oleh penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sebesar 56,8 juta jiwa (BPS, 1998).

Penanggulangan kemiskinan di tahun 1997, yaitu pada masa krisis moneter adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang memiliki prioritas: (a) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), (b) penciptaan lapangan kerja (*employment creation*), (c) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), (d) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (*social protection*).

Tahun 2000, program penanggulangan kemiskinan yang dilancarkan oleh pemerintah yang dikenal Dana Kompensasi Sosial (DKS) untuk program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur di pedesaan. Pada tahun 2001 dikenal Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE), dengan cakupan program raskin, pelayanan kesehatan, prasarana air bersih, pendidikan, transportasi, permukiman, dan dana bergulir. Tahun 2002-2004 dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM), dengan penambahan program alat kontrasepsi, dan bantuan padat karya. Pada tahun 2005 PKPS-BBM dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan atau subsidi langsung (BLT). Selanjutnya program kebijakan kegiatan PKPS-BBM dari tahun ke tahun relatif sama, hanya fokus kegiatan yang mengalami beberapa perubahan, yang meliputi: Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan dalam PNPM Mandiri adalah sebagai kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inti dari PNPM adalah masyarakat sebagai upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai masalah terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejateraan.

Akhir-akhir ini pelibatan perusahaan sangat diharapkan, sebagaimana hasil penelitian Mangos (2008) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan judul *An Integrated Theoretical Framework to Identify Poverty Alleviation Strategies for Corporate Sustainable Development: Poverty Alleviation Strategy of a Firm*, bahwa kerangka teoritis terintegrasi untuk indentifikasi strategi pengentasan kemiskinan perusahaan menggunakan piramida bagian bawah (BOP) pasar, kemitraan dengan organisasi lain, manajemen isu dan pembangunan keberlanjutan, sejalan dengan konsep-konsep MDGs. Strategi perusahaan yang diusulkan mencakup strategi sosial responsibility (SRS), dan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari SRS.

A.3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*)

A.3.1 Pengertian CSR

Jamali and Rabbathh (2007) mengemukakan CSR adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam ekonomi global. Semakin tingginya minat CSR dalam beberapa tahun terakhir muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang telah

commit to user

tercermin dalam kompleksitas bisnis yang meningkat dan memberikan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan *good corporate governance*.

Wibisono (2007) mengemukakan bahwa definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* sampai saat ini belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi *CSR* dan komponen *CSR* dapat berbeda-beda di negara-negara atau daerah yang lain, namun umumnya *CSR* berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. *CSR* tidak hanya merupakan kegiatan karitatif (sifat belas kasihan) perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum.

Elkington (1997) merumuskan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan) dan pada akhir 1990-an dan istilah *triple bottom line* ini semakin banyak digunakan yang merefleksikan apa yang telah berhasil dicapai, apa yang telah terjadi sebelumnya dan agenda apa yang akan dituju kemudian. Temuan ini didasari oleh pada isu dan dimensi sosial dan ekonomi yang sudah cukup kuat keberadaannya ditandai pada tahun 1987 Brundtland Report dalam WCED (1989) yang mengharuskan penanganan lingkungan harus lebih terintegrasi.

Menurut Budimanta, *et al.* (2008), *CSR* atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

commit to user

Jadi, menurut Budimanta tersebut *CSR* merupakan kegiatan yang memperhatikan keinginan dari semua *stakeholder* yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

European Commission (2001) mendefinisikan *CSR* sebagai sebuah konsep yang mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan secara sukarela dengan kesadaran bahwa perilaku yang bertanggung jawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. *CSR* adalah mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial dan bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda:

- a. Internal-praktik tanggung jawab sosial terutama ditujukan pada karyawan yang terkait dengan isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen sumber daya manusia, sementara praktik-praktik tanggung jawab terhadap lingkungan berkaitan terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan produksi.
- b. Eksternal-praktik *CSR* diluar perusahaan berkaitan dengan masyarakat setempat yang melibatkan berbagai *stakeholder* seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

Selanjutnya ada beberapa definisi yang dikemukakan berikut ini:

(1) World Bank (2002) memberikan definisi *CSR* sebagai:

“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Definisi CSR menurut World Bank di atas adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan/pekerja, serta komunitas lokal/setempat maupun masyarakat umum dalam meningkatkan kualitas kehidupan sehingga memiliki dampak yang baik bagi dunia usaha maupun pembangunan.

(2) CSR Forum (2005) juga memberikan definisi CSR:

“CSR mean open ad transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment”.

Menurut CSR Forum di atas, CSR merupakan praktik-praktik usaha yang terbuka dan transparan yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan penghargaan terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

(3) Uni Eropa (*EU Green Paper on CSR*) (2001) mengemukakan bahwa:

“CSR is a concept whereby companies integrate social and environment concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic”.

CSR menurut definisi oleh Uni Eropa ini adalah merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatiannya terhadap kondisi sosial dan lingkungan dalam aktivitas usahanya melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan atas dasar sukarela.

(4) *Canadian Business for Social Responsibility* (1998), definisi CSR sebagai:

“A company’s commitment to operating in an economically and environmentally sustainable manner; at the same time, recognize the interests of its stakeholders.”

Definisi di atas berarti sebuah komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan usaha berkelanjutan yang bersifat ekonomis dan lingkungan, sekaligus pada saat yang sama memahami keinginan dari para pemangku kepentingan.

(5) Bateman dan Snell (2002), *CSR* didefinisikan sebagai:

"...set of corporate actions that positively affects an identifiable social stakeholder's interest and does not violate the legitimate claims of another identifiable social stakeholder (in long run)".

Definisi *CSR* menurut Bateman dan Snell di atas adalah serangkaian upaya perusahaan yang secara positif mempengaruhi keinginan-keinginan yang telah diidentifikasi dari para pemangku kepentingan sosial dan tidak melanggar tuntutan logis (sah) lainnya dari para pemangku kepentingan sosial (dalam jangka panjang).

(6) Di Indonesia definisi *CSR* menurut Wibisono (2007) adalah:

Ditinjau dari segi etimologi diterjemahkan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan, atau tanggungjawab sosial korporasi, atau juga tanggungjawab sosial dunia usaha. Tentang hal ini belum adanya padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, namun konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka pengertian *Corporate Social Responsibility* mengacu pada tanggungjawab sektor bisnis yang berkaitan dengan semua pihak yang terlibat, dalam arti pihak yang mempengaruhi dan terpengaruh sebagai dampak dari operasionalisasi kegiatan ekonomi bisnisnya. Pihak yang terlibat dimaksud adalah para pemangku kepentingan, yaitu dalam bentuk kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi perusahaan dan pembangunan. Tujuan perusahaan adalah keuntungan, *commit to user*

tetapi tidak bisa terlepas dari masyarakat, karena *Pertama*; pemilik perusahaan, manajer dan karyawan adalah individu bagian dari masyarakat, *Kedua*; keuntungan perusahaan tidak akan tercapai tanpa adanya masyarakat yang menjadi pasar bagi produknya, *Ketiga*; kegiatan perusahaan tersebut pasti mempunyai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan masyarakat di tempat mana perusahaan itu beroperasi (Wermasubun, 2005).

Jadi, berdasarkan definisi *CSR* di atas dalam rangka tanggungjawab etika bisnis bahwa masyarakat adalah yang utama perlu diperhatikan sebagai pemangku kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh operasional perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat berkembang dan berkelanjutan.

Dalam ISO 26000, *CSR* mencakup tujuh isu pokok, yaitu: (1) Pengembangan masyarakat, (2) Konsumen, (3) Praktek kegiatan institusi yang sehat, (4) Lingkungan, (5) Ketenagakerjaan, (6) Hak Asasi Manusia, (7) *Organizational Governance* (Organisasi Pemerintahan). Berdasarkan konsep ISO 26000, maka untuk penerapan *CSR* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup tujuh isu pokok di atas. Prinsip-prinsip dasar *CSR* yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan *CSR* menurut ISO 26000 meliputi: (1) Kepatuhan kepada hukum, (2) Menghormati instrumen/ badan-badan inter-nasional, (3) Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya, (4) Akuntabilitas, (5) Transparansi, (6) Perilaku yang beretika, (7) Melakukan tindakan pencegahan, (8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Dokumen ISO 26000 tersebut meyakini bahwa seluruh jenis organisasi masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah dalam berbagai ukuran, memiliki tanggungjawab sosial yang pada dasarnya sama. ISO 26000 menyebutkan bahwa tanggungjawab sosial sesungguhnya adalah tanggungjawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya, dan tujuannya sendiri adalah mencapai pembangunan berkelanjutan. Lengkapnya, definisi tanggungjawab sosial adalah:

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”

Jadi, tujuan perusahaan melakukan CSR adalah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, atau dengan kata lain apapun yang dilakukan perusahaan yang tujuannya di luar pencapaian pembangunan berkelanjutan tidaklah akan dihitung sebagai CSR. Sementara, harus jujur diakui, bahwa tujuan sebagian besar perusahaan yang menjalankan berbagai aktivitas investasi sosial adalah pencitraan belaka. Nantinya, perusahaan-perusahaan seperti itu akan tidak bisa lagi dianggap menjalankan tanggungjawabnya. Rumusan CSR dalam ISO 26000 adalah tanggungjawab korporasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya dalam masyarakat, lingkungan, melalui perilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan, mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi dalam

commit to user

organisasi serta diimplementasikan dalam seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi korporasi.

Becchetti *et al.* (2005) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan serangkaian tindakan yang beragam dan diharapkan secara signifikan mempengaruhi struktur biaya dan partisipasi pekerja untuk produktif dalam setiap kegiatan. Sebagai akibatnya, ruang lingkup dan dampak CSR terhadap kinerja perusahaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sejumlah masalah yang ada dapat ditemukan dan dianalisis

Kesimpulannya bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka, yaitu perusahaan mencari keuntungan tetapi tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders* dan lingkungan di tempat operasional perusahaan tersebut.

A.3.2. Landasan Filosofis dan Prinsip-prinsip CSR

Dasar hukum konsep CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan yang diatur dalam Undang-undang, yaitu:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Pasal 15 Ayat (b), (d), dan (e), bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab sosial, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,

dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pasal 16 Ayat (d). menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 74 Ayat: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat satu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 Ayat 2 yaitu tentang hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 2 Ayat 1 (a), (b), dan (e), yaitu Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan turut aktif

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

(5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pasal 3 Ayat d, yaitu Penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial bertujuan: meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

(6) Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Secara keseluruhan dasar hukum di atas mempunyai landasan filosofis yang dalam konstitusi prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagai termaktub dalam preambul UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut:

“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat ini mendeskripsikan bahwa *the founding father* ingin meletakkan rumusan tujuan negara Indonesia yaitu negara kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep negara kesejahteraan ini telah menjadi landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Jadi, filosofi program CSR Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi rakyat.

commit to user

Menurut Wahyudi dan Azheri (2008), tujuan pokok *welfare state* antara lain adalah: (1) mengontrol dan memberdayakan sumberdaya sosial ekonomi untuk kepentingan publik, (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata, (3) mengurangi kemiskinan, (4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin, (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*, (6) memberikan proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Organization for Economic Cooperation and Development-OECD (2000), merumuskan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam implementasi CSR bagi perusahaan transnasional, yaitu:

- (1) Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (2) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
- (3) Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis.
- (4) Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.
- (5) Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan lain-lainnya

- (6) Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tatakelola perusahaan yang baik.
- (7) Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (*self regulation*) secara efektif guna menumbuhkan kembangkan relasi saling percaya di antara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.
- (8) Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan pada pekerja melalui program-program pelatihan.
- (9) Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih dan indiscipliner.
- (10) Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
- (11) Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tidak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

Dari prinsip-prinsip *CSR* di atas terlihat bahwa tidak terlepas dari konsep *Triple Bottom Line* sebagaimana yang diungkapkan oleh John Elkington yang terdiri atas *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*, prinsip HAM, *GCG*, dan *law enforcement* dan netralitas.

A.3.3. Tujuan Program CSR

Holme, R. and Watts (2000) mengemukakan bahwa tujuan program *CSR* adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan definisi *CSR* adalah sebagai:

commit to user

“the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of work life of workforce and their families as well as of the local community and social large”

berarti tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas atau masyarakat setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ahmad and Sulaiman (2004) menyimpulkan hasil penelitiannya pada perusahaan-perusahaan di Malaysia bahwa motivasi pengungkapan perusahaan terhadap lingkungan alam hanya untuk melegitimasi kegiatannya sebagai pertanggungjawabannya terhadap masyarakat, hal ini dilakukan perusahaan hanya sekedar memenuhi tuntutan masyarakat dengan tingkat yang rendah.

Lamberti and Lettieri (2009), menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa CSR merupakan strategi perusahaan industri makanan bayi di Italia untuk menerapkan etika bisnis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk mengatasi klaim para *stakeholders* terhadap keamanan makanan dan perilaku pasokan bahan baku.

Hayward (2005) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dimulai dari keinginan untuk dapat beroperasi berkelanjutan (*sustainable*), mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade. Jika sebuah perusahaan berupaya menjadi *sustainable* maka harus melakukan dua hal: (1) harus menjalankan bisnis yang mampu membuat keuntungan serta berinvestasi, (2) harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak

commit to user

yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, pengamat, media dan kalangan seperti LSM.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bisnis diharapkan keberlanjutan dan kesetabilan usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu ada tiga tujuan atau alasan mengapa *CSR* itu perlu dilakukan perusahaan, yaitu: (1) perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang menguasai sumberdaya ekonomi dan sumberdaya alam yang menyebabkan dampak terhadap masyarakat di lingkungan operasionalnya, adalah wajar memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai kompensasi sosialnya, (2) untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan dengan memberikan kontribusi positif, yang dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan, (3) untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap perusahaan karena dampak operasionalnya.

A.3.4. Masalah-masalah Implementasi *CSR*

Nampaknya perdebatan pada kesepakatan atas makna *CSR* itu sendiri berakhir pada penerapannya yang sering kali tidak implementatif bahkan cenderung hanya retorika sebagai sebuah strategi bersaing oleh perusahaan-perusahaan untuk nampak beretika namun tanpa kehilangan manfaat ekonomisnya. Berkesan penerapan *CSR* adalah karena sudah berlaku buruk, maka perusahaan mengkompensasikan kerugian yang dialami banyak pihak melalui tindakan baik yaitu program-program bagi komunitas lokal.

Carroll and Shabana (2010) dan Morimoto *et al.* (2005) menuliskan bahwa konsep *CSR* awalnya untuk menanggapi isu sosial atau isu yang ada pada *stakeholder*, itulah sebabnya manajemen perusahaan harus memperhatikan isu sosial atau *stakeholder* yang ada disekitarnya. Mereka menganggap pemilik, pelanggan, karyawan, komunitas, pesaing, pemasok, aktivis sosial, dan masyarakat luas sebagai *stakeholder*.

Joshi (2008) menyatakan menciptakan keuntungan adalah dimensi utama bagi perusahaan untuk mempertahankan pekerjaan dan memperbesar skala perusahaan yang berarti memaksimalkan dan mobilisasi kekayaan, sedangkan tanggung jawab sosial adalah akuntabilitas dasar suatu perusahaan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial. Oleh karenanya *CSR* juga terlibat sebagai bagian tanggung jawab dalam mensejahterakan *stakeholder* secara etis. Etis dan bertanggung jawab berarti memperlakukan *stakeholder* secara beradab dan dapat diterima masyarakat. *Stakeholder* itu berada di dalam dan di luar perusahaan sehingga *CSR* memiliki tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan standar hidup yang terus lebih tinggi dan lebih baik bagi masyarakat baik di dalam dan di luar perusahaan sambil menjaga profitabilitas perusahaan.

Heimann (2008) menyatakan bahwa organisasi bisnis memiliki tanggung jawab untuk berbagai kelompok dalam masyarakat (*stakeholder* internal dan eksternal) dan tidak hanya pemilik atau pemegang saham. Hal ini juga mencakup tanggung jawab atas lingkungan alam sehingga setiap keputusan harus diambil dalam kepentingan yang lebih luas dan tidak hanya kepentingan pemegang saham, karena itu ia menyebutkan beberapa keuntungan dan alasan mengapa *CSR* perlu

commit to user

dilaksanakan: (1) merupakan hal etis yang dilakukan, (2) Meningkatkan citra perusahaan, (3) hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari peraturan yang berlebihan, (4) jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan, (5) lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan, (6) dapat menarik minat para investor, (7) dapat meningkatkan motivasi karyawan, (8) dapat membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis. Pada akhirnya implementasi *CSR* bisa menjadi akan menguntungkan perusahaan jika dilakukan dalam beberapa cara: (1) membantu daya tarik dan retensi staf, (2) menarik investasi yang hijau dan etis, (3) Menarik pelanggan yang sadar dan etis, (4) hal ini dapat mengakibatkan pengurangan biaya melalui konsep daur ulang, (5) hal yang dapat membedakan dengan pesaing dan menjadi keunggulan kompetitif, (6) dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas dalam jangka panjang.

Tanaya (2004) mengutip bahwa ada enam langkah implementasi *CSR* ke dalam strategi perusahaan yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh *World Bank Institute* adalah sebagai berikut:

- (1) Komitmen awal. Langkah pertama ini komitmen awal perusahaan untuk melakukan *CSR* adalah krusial. Untuk membangun landasan dalam komitmen ini, perusahaan dapat mengacu pada manfaat potensial yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan *CSR*.
- (2) Analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Langkah kedua ini melibatkan suatu analisis yang rinci mengenai lingkungan eksternal, dan mempertimbangkan manfaat potensial bagi bisnis yang diperoleh dari

commit to user

integrasi *CSR* ke dalam suatu strategi bisnis. Banyak cara dapat digunakan untuk melakukan analisis eksternal misalnya analisis SWOT.

- (3) Mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Struktur dan prosedur internal perusahaan harus jelas mendefinisikan kewajiban dewan direksi, manajer senior, dan pekerja lainnya dalam kaitan dengan *CSR*.
- (4) Implementasi. Langkah ini merupakan suatu proses pembelajaran yang terus menerus. Dalam tahapan ini kemampuan kreativitas, mengambil resiko dan belajar dari kesalahan akan sangat dibutuhkan.
- (5) Pengukuran dan pelaporan hasil. Konsep "*Triple Bottom Line*" digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan dalam *CSR*. Hasil yang diperoleh perlu dikomunikasikan kepada publik.
- (6) Konsultasi dengan *stakeholders*. Hasil dan ukuran yang digunakan dalam aktivitas *CSR* dikonsultasikan dengan *stakeholders* termasuk di dalamnya adalah pemerintah, masyarakat sipil dan perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil masukan dari proses konsultasi, perusahaan kembali lagi pada langkah kedua dan mengulang seluruh proses.

Korporat atau perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Karena itu program *Corporate social Responsibility (CSR)* merupakan keharusan yang musti dilakukan seiring dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat sekitar (komunitas). Hal ini berarti, telah terjadinya pergeseran hubungan antara perusahaan (korporat) dengan masyarakat sekitar (komunitas). Perusahaan yang

commit to user

semula hanya sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini menjadikan masyarakat sekitar sebagai “mitra” yang turut andil dalam keberadaan dan keberlangsungan perusahaan (Irianta, 2004).

Iriantara (2004) menyatakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan adalah melalui program *community relations (CR)*, yang merupakan cara berinteraksi dengan komunitas yang saling terkait dengan operasi organisasi. Dengan adanya program *CR* akan diperoleh banyak manfaat untuk korporat maupun komunitas. Manfaat bagi korporat adalah: (a) reputasi dan citra yang lebih baik, (b) “lisensi untuk beroperasi” secara sosial, (c) memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal, (d) keamanan yang lebih besar, (e) infrastruktur dan lingkungan sosio-ekonomi yang lebih baik, (f) menarik dan menjaga personel berkaliber tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi, (g) menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan mungkin pelanggan yang bermutu, (h) “laboratorium pembelajaran” untuk inovasi organisasi. Dan manfaat bagi komunitas atau masyarakat sekitar adalah: (a) peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan, (b) pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur, (c) keahlian komersial, (d) kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat, (e) representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

Clark (2000) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan judul *Differences Between Public Relations and Corporate Social Responsibility: An Analysis*, bahwa hubungan masyarakat (*PR*) dengan komunikasi yang efektif dan *commit to user*

manajemen hubungan dalam penerapan tanggungjawab sosial perusahaan (*CSR*) mempengaruhi reputasi perusahaan. *PR* dan *CSR* mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi perusahaan dengan pemangku kepentingan. Komunikasi mempunyai peran penting dalam membangun hubungan yang berkualitas bagi kemampuan manajer dalam keputusan perusahaan tentang lingkungan, politik, sosial, juga daya saing bisnis.

Masalah lainnya adalah pengetahuan dan budaya masyarakat, sebagaimana hasil penelitian Haniffa and Cooke (2005) bahwa ada hubungan yang signifikan antara budaya masyarakat (Melayu) dan tatakelola perusahaan terhadap pengungkapan/pelaporan sosial perusahaan, sedangkan masalah pengetahuan dikemukakan oleh Unerman, and O'Dwyer (2007) bahwa pengetahuan merupakan faktor kunci dalam mengembangkan dan membangun pemahaman bagi berbagai pemangku kepentingan terhadap kesadaran dan persepsi masyarakat pada tingkat resiko yang mereka hadapi dari operasi perusahaan.

Program lainnya adalah *Community Development (CD)* yang didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan ruang lingkup program *CD* adalah: (a) *community services*, merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, (b) *community empowering*, adalah program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, (c) *community relation*, yaitu kegiatan yang terkait dengan *commit to user*

pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait (Budimanta *et al.*, 2008).

Implikasi dari program *CSR* adalah program *Community Relation (CR)* dan program *Community Development (CD)*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR* di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat perusahaan negara dan perusahaan swasta seperti UU 19/2003 tentang BUMN, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang intinya perusahaan yang melakukan kegiatannya di wilayah NKRI mempunyai kewajiban sosial terhadap bangsa Indonesia. Namun, beberapa UU ini belum mengatur secara jelas sejauhmana tanggungjawab sosial perusahaan ini harus dilakukan.

Untung (2008) mengemukakan bahwa manfaat *CSR* bagi perusahaan adalah: (a) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, (b) mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (c) mereduksi risiko bisnis perusahaan, (d) melebarkan akses sumberdaya bagi operasi sosial, (e) membuka peluang pasar yang lebih luas, (f) mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, (g) memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, (h) memperbaiki hubungan dengan regulator, (i) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, (j) peluang mendapatkan penghargaan. Jadi, perusahaan yang menerapkan *CSR* dengan benar akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Menurut Tanaya (2004), esensi *CSR* merupakan wujud dari *giving back* dari perusahaan kepada komunitas atau masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan *commit to user*

untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar (*stakeholders*). Selanjutnya bahwa tujuan CSR bukan hanya pembangunan komunitas semata. Inti tujuan CSR yaitu bagaimana pembangunan komunitas bisa terus eksis berada dalam masyarakat sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam.

Kotler dan Lee (2005) mengidentifikasi enam pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari CSR. Keenam inisiatif sosial tersebut yaitu:

- (1) Pertama, *cause promotions* dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti, misalnya, bahaya narkoba.
- (2) Kedua, *cause-related marketing* bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekiang persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu.
- (3) Ketiga, *corporate social marketing* di sini perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk mengubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif, seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang beradab.
- (4) Keempat, *corporate philanthropy* adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai.

- (5) Kelima, *community volunteering* dalam aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat.
- (6) Keenam, *socially responsible business practices*, adalah inisiatif perusahaan mengadopsi dan melakukan bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.

Wahyudi dan Azheri. (2008) mengutarakan bahwa aktivitas *CSR* meliputi lima pilar, yaitu:

- (1) *Building human capital*, hal ini berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang handal, di sisi lain perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) *Strengtening economics*, yaitu perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemerataan kesejahteraan.
- (3) *Assesing social chesion*, yaitu upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik.
- (4) *Encouraging governance*, yaitu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada *Corporate Governance*.
- (5) *Protecting the environment*, yaitu mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar.

Selanjutnya suatu kegiatan disebut *CSR* atau tanggungjawab sosial perusahaan bila memiliki sejumlah unsur-unsur berikut:

- (1) *Continuity and sustainability* atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari *CSR*. Suatu kegiatan amal yang berdasar trend *commit to user*

ataupun insidental bukanlah *CSR*. *CSR* merupakan hal yang bercirikan pada *long term perspective*, bukan *instant*, *heppening* ataupun *booming*. *CSR* adalah suatu kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi.

(2) *Community empowerment* atau pemberdayaan masyarakat, Hal inilah yang membedakan *CSR* dengan kegiatan yang bersifat *charity* ataupun *philantrophy* semata. Kegiatan kedermwawan meskipun membantu masyarakat, tetapi tidak menjadikan masyarakat tersebut mandiri. Salah satu indikasi kesuksesan program *CSR* adalah adanya kemandirian yang lebih pada masyarakat dibandingkan sebelum adanya program *CSR*.

(3) *Two ways*, program *CSR* itu bersifat dua arah. Perusahaan tidak berperan sebagai komunikator saja, tetapi juga harus mampu sebagai komunikan yang mendengarkan aspirasi masyarakat, dengan melakukan *need assessment*, yaitu mengetahui *needs*, *desires*, *interest*, dan *wants* dari masyarakat.

Masalahnya sekarang apakah suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial ini murni atau sebagai promosi sesaat saja, karena banyak perusahaan di Indonesia ini yang mengalami gugatan dari masyarakat sekitar. Salah satu dimensi tanggungjawab sosial perusahaan adalah melakukan program pengembangan masyarakat (*community development*) yang masih disikapi penuh skeptis oleh banyak pihak yang sebelumnya menyerang. Apakah tanggungjawab sosial perusahaan tersebut merupakan inisiatif sukarela atau kewajiban sebagai pembayar kesalahan perusahaan agar dimaafkan sehingga dapat beroperasi terus. Apalagi banyak perusahaan yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab

sosial, tetapi hanya dilakukan ketika terdesak oleh masyarakat atau hukum yang berlaku, hal inilah yang merupakan promosi sesaat saja.

Dalam teori ekonomi, *CSR* dilihat sebagai alat strategis perusahaan untuk mencapai sasaran hasil akhir, dan menciptakan kekayaan dalam jangka panjang, perusahaan bertanggungjawab ke pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan akan menerapkan *CSR* sepanjang mereka dapat bermanfaat secara ekonomis dari pelaksanaan perilaku yang bertanggungjawab tersebut, seperti menciptakan suatu merek yang akan meningkatkan pemasaran, dan bagaimana dapat meningkatkan laba dalam jangka panjang (Lamberti and Lettieri, 2009).

Hubungan yang baik masyarakat dan perusahaan harus diletakkan pada prinsip simbiosis mutualistik, saling pengertian dan saling memberi manfaat. Melalui konsep ini, masyarakat diharapkan berperilaku santun dan kooperatif terhadap eksistensi perusahaan, sementara perusahaan tetap dapat beroperasi secara sehat mengejar keuntungan sambil tetap meningkatkan tanggungjawab sosial terhadap lingkungannya, tanpa khawatir akan adanya gangguan sosial.

Perubahan tingkat kesadaran masyarakat itulah yang memunculkan kesadaran baru perusahaan pentingnya melaksanakan program *CSR*. Dan faktor yang mempengaruhi implementasi *CSR* adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Untung, 2008).

A.3.5. Lingkup Kegiatan *CSR*

Tanggungjawab sosial perusahaan mencakup tiga hal, yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line* dengan pengertian sebagai tiga dimensi tanggung

jawab. Tiga dimensi tanggung jawab ini adalah *dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan*. Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional bisnis: menghasilkan keuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya yaitu pemegang saham. Dimensi sosial berasal dari aspek sosial dari kegiatan bisnis, berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Dimensi lingkungan berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan yang sehat dan adanya jaminan akan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak hanya dikenakan pada kegiatan produksi, misalnya pembuangan limbah produksi, tetapi juga pada perolehan bahan baku akibat penggunaan produk yang dihasilkan.

Untung (2008) menyatakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Kompleknya permasalahan sosial pada dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Menurut The World Bank Institute yang dikutip oleh Tanaya (2004) menyebutkan komponen utama CSR adalah sebagai berikut:

- (1) Proteksi Lingkungan. Fokusnya terletak pada menemukan solusi penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perusahaan terhadap lingkungan.

- (2) Jaminan Kerja. Meliputi kebebasan berserikat dan pengenalan yang efektif akan hak untuk berunding secara kolektif, penghapusan semua bentuk kerja wajib maupun kerja paksa, buruh anak-anak, dan penghapusan diskriminasi menyangkut pekerjaan dan kedudukan.
- (3) Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus utama terletak dalam mengembangkan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dimana kreativitas dan pembelajaran mewarnai etika profesional, dan keseimbangan antara pekerjaan dan aspek lain kehidupan.
- (4) Keterlibatan dalam Komunitas. Keterlibatan perusahaan dalam masyarakat mengacu pada suatu cakupan luas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan dampak dari donasi uang, waktu, produk, jasa, pengaruh, pengetahuan manajemen dan sumberdaya lainnya pada masyarakat di mana mereka beroperasi.
- (5) Standard Bisnis. Standard bisnis mencakup suatu area luas dari aktivitas perusahaan seperti etika, imbalan keuangan, perlindungan lingkungan, standard kerja HAM. Standard tersebut umumnya diterima pada tingkatan perusahaan, asosiasi bisnis, industri atau nasional.
- (6) Pasar. Mencakup antara lain distribusi, etika pemasaran, penetapan harga, penagihan, pengenalan produk, kualitas dan keamanan produk. Dalam kaitan CSR, isu pasar, meluas pada suatu cakupan luas aktivitas bisnis yang menggambarkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan.

- (7) Pengembangan Ekonomi dan Badan Usaha. Meliputi antara lain daya saing, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal, kewiraswastaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keuangan mikro.
- (8) Proteksi Kesehatan. Tempat kerja kini dikenal sebagai tempat penting untuk melakukan promosi kesehatan di dalam negara-negara industri, dan perusahaan dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan kesehatan.
- (9) Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu unsur kunci dari pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak pada kelompok miskin, bisnis, bekerja dengan masyarakat sipil dan badan publik, dapat memberikan suatu kontribusi penting yaitu menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
- (10) Bantuan Bencana Kemanusiaan. Perusahaan bekerjasama dengan badan publik, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, memainkan peran penting dalam mendukung operasi bantuan bencana kemanusiaan.

Secara teoretik, CSR dapat sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholders*-nya, terutama masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan kerugian yang minimal pada kelompok masyarakat lainnya.

Tanggungjawab perusahaan mencakup empat jenjang yang merupakan satu kesatuan, yaitu: ekonomis, hukum, etis, dan filantropis. Secara ekonomis berarti

commit to user

perusahaan perlu laba untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Namun tujuan mencari laba, perusahaan juga harus bertanggungjawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Secara etis perusahaan juga bertanggungjawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma-norma kemasyarakatan. Tanggungjawab filantropis berarti perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis-kultural yang kuat dari masyarakatnya.

A.4. Persepsi

Dalam program pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian, maka peran perusahaan sangat strategis bagi keberhasilannya. Karena perusahaan merupakan bagian yang potensial memiliki finansial dalam hal penerapan dan pelaksanaan program CSR. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ditentukan oleh persepsi terhadap kegiatan pemberdayaan melalui program CSR. Persepsi menentukan cara pandang dan bertindak seseorang terhadap suatu objek, karena itu perlu penjelasan mengenai pengertian persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Hediger (2010) menyatakan bahwa *CSR* dipandang sebagai sebuah konsep atau cara perusahaan yang melampaui bentuk filantropi dan kepatuhan dalam mengatasi dan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dan hubungannya pemangku kepentingan perusahaan dalam semua bidang yang berpengaruh seperti tempat kerja, pasar, rantai pasokan, masyarakat dan wilayah kebijakan publik. Penafsiran ini menunjukkan peran *CSR* sebagai konsep pedoman untuk bisnis yang di satu sisi membutuhkan ruang penafsiran kontekstual dan di sisi lain menyerukan untuk mengambil nilai-nilai dan tuntutan masyarakat untuk menjadi pertimbangan.

A.4.1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif. Aspek kognisi adalah aspek penggerak perubahan, karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Komponen kognisi akan berpengaruh untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu objek yang merupakan jawaban atau pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek tertentu. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat dan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan timbul ide baru kemudian konsep dari apa yang dilihat (Mar'at, 1984).

Menurut Thoha (2004), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, melalui

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya Thoha mengutip pendapat Morgan dan King (1984) bahwa persepsi adalah penglihatan atau pandangan seseorang terhadap objek atau kondisi tertentu yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya terhadap objek atau kondisi itu.

Menurut Rakhmat (1994), menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Begitu juga Robbins (1996) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Wirawan (1989) menyatakan bahwa persepsi adalah proses kategorisasi, organisme dirangsang melalui masukan-masukan tertentu (obyek-obyek diluar, peristiwa dan lain-lain) dan organisme merespon masukan ini dengan salah satu kategori obyek-obyek atau peristiwa. Proses penghubung ini adalah proses yang aktif dari individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari format yang tepat, dengan demikian persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).

Krech and Crutchfield, (1969) *cit.* Rakhmat (1994) merumuskan dalil persepsi (1) persepsi bersifat selektif secara fungsional, dalil ini berarti bahwa objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi. Kebutuhan biasa di organisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya, walaupun stimuli yang kita terima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan

interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi. (2) sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Menurut dalil ini, jika individu sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang merupakan asimilasi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu kesan atau tanggapan serta gambaran yang merupakan penafsiran terhadap suatu objek tertentu yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya proses seseorang mengetahui sesuatu hal (objek) melalui pengamatan oleh pancainderanya, dan jika dilihat dari isinya merupakan pandangan, tanggapan, dan penafsiran seseorang terhadap suatu objek.

A.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

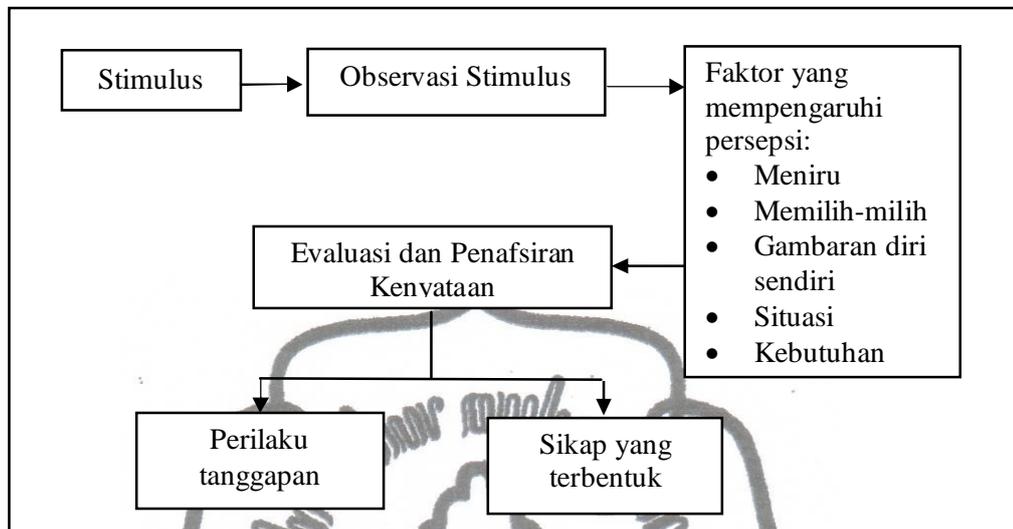
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain faktor internal, yaitu apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi dan faktor eksternal yaitu faktor stimulus dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Chaplin (1989) menyatakan pula bahwa persepsi tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat, keadaan jiwa, dan faktor-faktor motivasional, maka arti suatu objek atau kejadian objek ditentukan untuk kondisi perangsang maupun faktor organis. Proses persepsi dimulai dengan perhatian yaitu mulai proses pengamatan selektif. Faktor perangsang yang penting adalah perubahan intensitas, ulangan, kontras dan gerak, sedangkan faktor organisnya adalah minat, kepentingan, dan kebiasaan yang telah dipelajari.

Menurut Robbins (1996), persepsi dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor pada pemersepsi yaitu perilaku, kebutuhan, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Perilaku terbentuk melalui suatu proses pembelajaran, seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung dinilai mempunyai wawasan yang luas karena dengan memiliki wawasan tersebut tingkat kebutuhan semakin tinggi dan dapat merangsang seseorang menggunakan suatu pengaruh yang kuat pada persepsinya, dan persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat dilihat dari tingkat pengalamannya.
- 2) Faktor pada situasi yaitu, waktu, keadaan, atau tempat berusaha, dan keadaan sosial. Waktu adalah suatu objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti juga lokasi setiap jumlah faktor situasional, unsur-unsur di lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi-persepsi seseorang.
- 3) Faktor pada target yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan. Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan.

Menurut Gibson (1990), persepsi adalah proses pemberian arti pada lingkungan oleh seorang individu akibat adanya stimulus, setiap individu yang berbeda akan memberikan arti yang berbeda pula untuk objek yang sama. Proses terjadinya persepsi individu dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut:



Gambar 2.2: Proses persepsi (*The perceptual process*)

Menurut Wirawan (1989), yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- (a) Perhatian, karena seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada tetapi lebih memfokuskan perhatian terhadap satu atau dua obyek. (b) Set, harapan seseorang akan rangsangan akan muncul. (c) Kebutuhan, baik kebutuhan sesaat ataupun menetap pada diri seseorang mempengaruhi persepsinya terhadap suatu objek. (d) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. (e) Ciri kepribadian, terpengaruh persepsi seseorang. (f) Gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan persepsi yang salah disebut halusinasi.

A.5. Partisipasi

Di depan telah dikemukakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui program CSR ditentukan oleh komitmen perusahaan dalam hal penyediaan dan penyaluran dana yang disisihkan perusahaan, dan persepsi masyarakat terhadap CSR. Selain itu partisipasi atau keterlibatan masyarakat

commit to user

perlu diperhatikan dan ditumbuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat akan muncul jika program tersebut sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan budaya masyarakat setempat. Berikut tinjauan tentang partisipasi menyangkut pengertian, lingkup, dan bentuk serta jenis partisipasi.

A.5.1. Pengertian Partisipasi

Mardikanto (2010) mengutip beberapa pengertian partisipasi, antara lain sebagai berikut: Pengertian partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Selanjutnya Bomby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Beal (1964) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*).

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai: (1) kondisi yang tidak memuaskan, (2) kondisi tersebut dapat/diperbaiki melalui kegiatan manusia atau

masyarakat sendiri, (3) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (4) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

A.5.2. Lingkup Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan, mencakup lingkup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Yadav, (1961) *cit.* Mardikanto, (2010) mengemukakan ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi

langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat (tenaga, uang, atau bentuk korbanan lainnya) yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat.
- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Dalam hal ini diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan selesainya pelaksanaan pembangunan tidak selalu berarti langsung dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, karena seringkali masyarakat luas justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan itu akan sia-sia.

Menurut FAO (1989), partisipasi mempunyai makna: (a) kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, (b) Partisipasi adalah “kepekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan, (c) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang berarti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, (d)

commit to user

Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial,

(e) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

A.5.3. Bentuk-bentuk dan Jenis-jenis Partisipasi

Dusseldrop, (1981) *cit.* Mardikanto, (2010) mengidentifikasi beragam bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat berupa: (1) menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat, (2) melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, (3) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, (4) menggerakkan sumberdaya masyarakat, (5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, (6) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sikor (1994) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa metode dan bentuk partisipasi petani berpengaruh terhadap proses pemberdayaan untuk pembangunan pedesaan, sedangkan Slamet (1985) mengemukakan keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, seperti Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2: Ragam Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang ditunjukkan	Ragam Partisipasi				
	1	2	3	4	5
Memberikan input	+	+	+	+	-
Menerima imbalan atas input yang diberikan	+	-	+	-	-
Menikmati manfaat hasil	+	+	-	-	+

- 1) Ragam partisipasi 1: adalah ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, dan ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada masyarakat/petani yang ikut padat karya perbaikan saluran pengairan yang mengairi sawahnya.
- 2) Ragam partisipasi 2: adalah warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan tidak memperoleh imbalan atas korbanan yang diberikan, tetapi ikut menikmati hasil pembangunan. Partisipasi bentuk ini dapat dijumpai pada petani yang bergotongroyong memperbaiki saluran irigasi yang mengairi sawahnya.
- 3) Ragam partisipasi 3: adalah ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini, dapat dilihat pada pekerja bangunan hotel-hotel berbintang, mereka tidak ikut menikmati hasil pembangunannya.
- 4) Ragam partisipasi 4: adalah ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta

commit to user

menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, misalnya oleh para penyumbang dana (donatur) atau sponsor kegiatan sosial.

- 5) Ragam partisipasi 5: adalah tidak ikut memberikan input, tidak menerima imbalan, tetapi ikut menikmati hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada “pihak ketiga”.

Dari kelima ragam partisipasi di atas, bentuk partisipasi 2 seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan ragam partisipasi 4 hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapisan atas”, sedangkan ragam partisipasi 5 seharusnya tidak boleh terjadi meskipun sulit direalisasikan.

Travers (1997) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kesenjangan bidang kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pendidikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Ndraha (1990) mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan artinya partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam 6 (enam) fase proses pembangunan, antara lain fase penerimaan informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerima kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan. Sebagai keluaran artinya partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Slamet (1985) mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu: (1) adanya kesempatan untuk ikut dalam pembangunan, (2) Adanya kemauan untuk memanfaatkan kesempatan, dan (3) adanya kemauan untuk berpartisipasi.

commit to user

A.6. Dinamika Kelompok

Secara konseptual pemberdayaan kelompok diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Kelompok dimaksud adalah kelompok usaha yang dilakukan oleh masyarakat miskin sekitar perusahaan. Kemandirian kelompok dapat terwujud jika kelompok mampu secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan manajemen dan usaha, karena itu fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan manajemen dan usaha ekonomi.

Jetkins (1978) *cit.* Mardikanto (1998) mengingatkan pentingnya kajian terhadap dinamika kelompok, yaitu kajian terhadap kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota kelompok dan kelompok yang bersangkutan untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Hal itu dilandasi oleh pemikiran bahwa tercapainya tujuan kelompok akan sangat ditentukan oleh tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang merupakan perwujudan dari perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku anggota kelompok.

Mardikanto (1998) menyebutkan analisis terhadap dinamika kelompok dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Pendekatan sosiologis, yaitu analisis terhadap bagian atau komponen-komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Tujuan kelompok, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai.

commit to user

- b) Unsur-unsur yang menyangkut pembagian tugas dan hak serta kewajiban anggota-anggota kelompok yang meliputi: (1) Jenjang sosial (*social rank*), yaitu hal yang menunjukkan perbedaan tertentu yang akan membedakan penghargaan, penghormatan, dan hak atau wewenang anggota-anggotanya. (2) Peran kedudukan (*status role*), yaitu peran yang harus dilakukan atau ditunjukkan oleh anggota kelompok sesuai dengan kedudukan yang diperolehnya dalam struktur sistem sosial bersangkutan. (3) Kekuatan (*power*), yaitu kewenangan yang memungkinkan seseorang menggerakkan orang lain melaksanakan suatu kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. (4) Unsur-unsur yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan yang harus ditaati oleh semua anggota dalam menunjukkan perilaku dan melaksanakan peran demi tercapainya tujuan kelompok.
- 2) Pendekatan psikososial, adalah analisis kelompok dengan melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok.

Slamet (1988) mengemukakan ada unsur-unsur dinamika kelompok yaitu:

1) Tujuan Kelompok (*Group Goals*)

Tujuan kelompok seharusnya menunjang tujuan anggota/individu, sehingga kelompok mempunyai dinamika yang tinggi karena tujuan kelompok merupakan sumber motivasi bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kelompok. Sebagai unsur kelompok, tujuan ini merupakan hal yang mutlak, ada relevansinya dengan tujuan kelompok dan diketahui oleh anggota.

Kejelasan tujuan kelompok sangat diperlukan agar anggota kelompok dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok.

2) Struktur Kelompok (*Group Structure*)

Struktur kelompok adalah hubungan individu-individu di dalam kelompok yang sesuai dengan posisi dan peranan individu. Hal-hal yang berhubungan dengan struktur kelompok, yaitu struktur pengambilan kekuasaan, struktur tugas atau pembagian pekerjaan, struktur komunikasi atau bagaimana aliran komunikasi yang terjadi dalam kelompok serta sarana bagi kelompok untuk dapat berinteraksi. Struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok akan makin kuat jika masing-masing anggota terlibat dalam tugas-tugas kelompok.

3) Fungsi Tugas (*Task Function*)

Fungsi tugas yaitu segala kegiatan yang dilakukan kelompok untuk mencapai tujuannya. Kriteria yang dipakai untuk fungsi tugas adalah:

- a) Fungsi memberikan informasi; kelancaran arus informasi menunjukkan bahwa fungsi berjalan baik.
- b) Fungsi memuaskan anggota; makin tinggi tingkat kepuasan anggota kelompok mengakibatkan fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok makin kuat.
- c) Fungsi koordinasi; makin baik penyelenggaraan koordinasi, makin baik dinamika kelompok.
- d) Fungsi menjelaskan; makin sering kelompok menjelaskan kepada anggota tentang sesuatu yang kurang jelas maka fungsi tugas makin baik.

commit to user

4) Mengembangkan/Membina Kelompok (*Group Building and Maintenance*)

Mengembangkan dan membina kelompok, yaitu cara kelompok mempertahankan hidupnya, yang dapat dilihat beberapa ciri sebagai berikut: (a) pembagian tugas yang merata, (b) adanya fasilitas yang memadai, (c) tumbuhnya norma kelompok (ketaatan anggota terhadap kelompok), (d) adanya proses sosialisasi, dan (e) mendapatkan anggota baru.

5) Kekompakan Kelompok (*Group Cohesiveness*)

Kekompakan kelompok, adalah adanya rasa keterikatan yang kuat di antara anggota kelompok, tingkat keterikatan yang berbeda-beda menyebabkan adanya tingkat kesatuan yang berbeda-beda. Kekompakan kelompok dipengaruhi oleh besarnya kelompok, keanggotaan kelompok atau kepemimpinan kelompok.

6) Suasana Kelompok (*Group Atmosfer*)

Suasana kelompok ditentukan para anggota terhadap kelompoknya, terhadap tujuannya dan terhadap anggota-anggota lainnya. Apakah suasana itu penuh akrab, tegang, senang, serius, apatis dan sebagainya.

7) Tekanan pada Kelompok (*Group Pressure*)

Tekanan/desakan kelompok atau tekanan kelompok ini berfungsi bagi ketaatan (*conformity*) terhadap norma-norma kelompok, dan bagi keseragaman dalam aktivitas kelompok. Sumber tekanan atau desakan ini dapat berasal dari luar atau dalam kelompok, bahkan dapat dari dalam diri masing-masing anggota.

8) Keefektifitas Kelompok (*Group Effectiveness*)

Keefektifan kelompok mempunyai timbal balik dengan kedinamisan kelompok, kelompok yang efektif meningkatkan dinamika kelompok dan sebaliknya kedinamisan kelompok meningkatkan keefektifan kelompok. Efektifitas kelompok dapat dilihat dari produktifitas, semangat anggota dipakai untuk mengukur produktifitas, semangat anggota dipakai untuk mengukur semangat kelompok. Keberhasilan anggota dalam mencapai tujuan pribadinya dipakai untuk mengukur kepuasan anggota.

9) Agenda Terselubung (*Hidden Agenda*)

Seseorang termasuk pemimpin atau anggota kelompok secara pribadi dapat memiliki tujuan yang tidak terungkap kepada orang lain. Maksud tersembunyi seseorang anggota terhadap orang lain dapat sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan kelompok atau pemimpinnya, yang dapat membuat kelompok semakin dinamis atau sebaliknya.

B. Penelitian Pendahuluan

Sebagai dasar pengembangan model pemberdayaan yang bagaimana harus dilakukan dalam mengimplentasikan CSR oleh perusahaan, perlu diperhatikan bahwa akar penyebab kemiskinan petani di Provinsi Lampung lebih banyak disebabkan oleh karena faktor budaya dan struktural (Hasanuddin, 2009).

Selanjutnya hasil pengamatan pendahuluan pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa program CSR yang telah dilakukan perusahaan adalah banyak yang bersifat insidental dalam bentuk bantuan-bantuan

commit to user

kepada masyarakat miskin sekitar perusahaan, seperti: (1) pada bidang pendidikan, merehabilitasi sekolah-sekolah, program Beasiswa, pemberian seragam bagi murid-murid Sekolah Dasar, (2) pada bidang kesehatan, menyelenggarakan sunatan masal dan pengobatan gratis, (3) pada bidang ekonomi, memberikan bantuan uang tunai (serupa dengan BLT), (4) pada bidang pelestarian lingkungan, menyelenggarakan penanaman pohon program penghijauan, pengolahan limbah dengan Amdal.

Sejak tahun 2008 PTPN-7 (Persero) sudah melakukan program Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL). Program Kemitraan dilakukan terhadap Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan, yang pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program penguatan usaha kecil memberikan pinjaman dana bergulir dan pendampingan disebut Program Kemitraan, serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan disebut Program Bina Lingkungan. Sebagai tindaklanjut terbitnya Surat Keputusan Direksi PTPN-7 Nomor 7.13/Kpts/001/2008 Tanggal 3 Januari 2008 tentang Pedoman Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dasar Terbitnya Surat Keputusan Direksi PTPN-7 tersebut adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PK-BL), dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Serta Peraturan Meneg BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Program PK-BL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PTPN-7 merupakan implementasi dari program CSR perusahaan yang dikenal dengan Slogan *PTPN-7 Peduli*, yang secara teknis dan administrasi ditangani oleh Divisi khusus, yaitu bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program CSR PTPN-7 Peduli ditujukan perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholder* terkait, terutama adalah masyarakat di sekitar atau di sekeliling perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi terciptanya keseimbangan pembangunan baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Perusahaan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan cara menyisihkan sebagian laba.

Bentuk Program CSR yang dilakukan perusahaan PTPN-7 dikemas dalam program *PTPN-7 Peduli*, peduli pada tujuh bidang kegiatan, yaitu: (1) *PTPN-7 Peduli* Kemitraan, (2) *PTPN-7 Peduli* Bencana Alam, (3) *PTPN-7 Peduli* Pendidikan, (4) *PTPN-7 Peduli* Kesehatan, (5) *PTPN-7 Peduli* Pembangunan, (6) *PTPN-7 Peduli* Keagamaan, dan (7) *PTPN-7 Peduli* Lingkungan.

Peduli kemitraan adalah kepedulian perusahaan pada bidang ekonomi (*Profit*) dalam upaya menumbuh dan mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi tangguh dan mandiri. Usaha tersebut meliputi industri kerajinan Kain Tapis khas Lampung, kerajinan Batik Lampung, kerajinan Bordir, kerajinan Meubel, kerajinan

commit to user

Keripik Pisang. Peduli bidang sosial kemasyarakatan (*People*) meliputi peduli bidang bencana alam, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kegiatan CSR bidang sosial PTPN-7 Peduli yang telah dilakukan adalah: Bantuan bencana alam (banjir, kebakaran, atau gempa bumi) yang diberikan dalam bentuk bahan pangan, obat-obatan, pakaian maupun pembangunan dapur umum, pembangunan tempat penampungan sementara. Bantuan pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di wilayah sekitar perusahaan, pemberian bea siswa, memberikan bantuan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Bantuan bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar perusahaan adalah pengobatan gratis, sunatan massal, pelayanan KB gratis dan paket obat-obatan. Peduli keagamaan di sekitar perusahaan adalah dalam bentuk bantuan pembangunan dan renovasi fasilitas ibadah (masjid atau mushola, dan gereja), santunan bagi anak yatim-piatu. Peduli bidang lingkungan (*Planet*), meliputi bantuan pembangunan fasilitas umum (Fasum) seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, pembangunan pertanian, penanaman pohon penghijauan, penanaman mangrove di sepanjang pantai Selatan, dan pantai Timur Provinsi Lampung.

Implementasi CSR oleh perusahaan PTPN-7 (Persero) tersebut di atas menurut pengamatan sementara dapat disimpulkan sudah memenuhi kriteria pemberdayaan masyarakat, tetapi masih bersifat filantropi dan atau charity, karena pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, permodalan, teknologi, dan pasar dengan

commit to user

pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian, yang sifatnya juga berkelanjutan dalam bentuk program yang terintegrasi dalam strategi kebijakan perusahaan yang diimplementasikan dalam keseluruhan aktivitas perusahaan yang terkait.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan kemakmuran serta taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat petani yang memiliki akses langsung terhadap eksploitasi sumberdaya alam tersebut justru hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Memperhatikan masalah di atas, kemungkinan penyebab kemiskinan masyarakat juga ditimbulkan oleh kurang tersedianya kesempatan bekerja dan berusaha serta karakteristik individu masyarakat miskin tersebut. Kurang tersedianya kesempatan bekerja dan berusaha di wilayah lingkungan masyarakat pada tahap selanjutnya tidak memungkinkan mereka mencari tambahan pendapatan pada saat-saat menghadapi krisis, sehingga dengan keadaan tingkat hidupnya yang selalu dekat dengan kerawanan subsistensi akan mudah menyebabkan mereka jatuh miskin. Dipihak lain, karakteristik individu masyarakat miskin itu sendiri seperti tingkat pengetahuan yang rendah, pemilikan asset modal yang minim, aspirasi yang rendah serta keinginan untuk berubah yang juga rendah diduga menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk beranjak dari cengkaman kemiskinan. Dengan demikian, untuk mengatasi keadaan ini tidak

hanya diperlukan keinginan yang sungguh-sungguh dari masyarakat miskin untuk mengubah nasibnya, tetapi juga memerlukan uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta maupun perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengentaskan kemiskinan yang dijumpai.

Untuk mengangkat masyarakat dari masalah kemiskinan, maka tidak lain harus dipenuhinya peluang kerja dan pendapatan. Esensi dari didapatnya peluang kerja dan pendapatan adalah dalam rangka terciptanya suasana dan situasi ke arah masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki pendapatan yang cukup maka keinginan untuk terpenuhinya kebutuhan pokok lain, seperti pemukiman, kesehatan dan pendidikan akan dapat dicapai. Oleh sebab itu diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan dengan memperhatikan spesifik daerah yang pada saat ini diawali dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Memperhatikan perilaku ekonomi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan peran *stakeholders* pembangunan yaitu pemerintah (pusat dan daerah), penyuluh PNS atau penyuluh swasta, LSM, serta pengusaha pemberi modal dalam membentuk perilaku ekonomi baru masyarakat miskin sekitar perusahaan sehingga dapat mengatasi bersama-sama kemiskinan yang ada.

Selanjutnya dalam rangka turut serta mengatasi masalah kemiskinan di atas, perusahaan-perusahaan memiliki program *CSR* dengan tujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri, ketiga aspek ini dikenal dengan teori "*Triple Bottom Line*" Jhon Elkington's. Namun demikian keberhasilan *CSR* dalam *commit to user*

mencapai tujuannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal perusahaan antara lain menyangkut berbagai strategi dan metode pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, tenaga pelaksana *CSR* perusahaan, alokasi dan jumlah dana *CSR* serta persepsi dan pemahaman perusahaan itu sendiri terhadap konsep *CSR*, sedangkan faktor eksternal seperti dukungan pemerintah beserta instansinya, dukungan masyarakat sekitar perusahaan maupun *stakeholder* yang lainnya. Oleh karena itu keberhasilan program *CSR* memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang peduli dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Perusahaan sebagai lembaga ekonomi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa adanya hubungan yang erat kaitannya dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan itu sendiri. Karena itu, pelaksanaan program *CSR* dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan. Kehadiran perusahaan yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sekitar akan memberikan rasa aman dalam operasionalisasi perusahaan, akan menyebabkan dampak positif bagi perusahaan dalam hal keberlanjutan operasional usahanya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dimungkinkan dapat tercapai melalui usaha-usaha peningkatan keberdayaan masyarakat itu sendiri. Usaha-usaha peningkatan keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan ini dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan pada individu baik dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki sehingga masyarakat sekitar perusahaan mempunyai akses yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatannya. Karena itu untuk mencapai keberhasilan program *CSR* tidak

commit to user

hanya ditentukan oleh pihak perusahaan saja tetapi juga akan ditentukan oleh masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran program serta dukungan dari berbagai pihak *stakeholder* dalam mewujudkan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sebagaimana termaktub dalam tujuan pembangunan nasional.

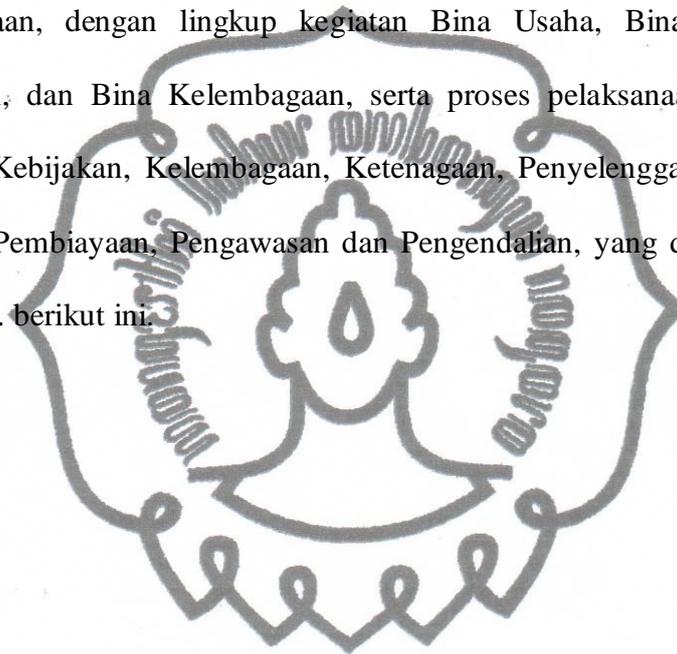
Program *CSR* dengan tiga dimensi tanggungjawab perusahaan tersebut di atas, implementasinya terhadap masyarakat miskin sekitar perusahaan dilaksanakan dengan program penyuluhan dan pemberdayaan. Salah satu ide pokok tersebut terkait dengan mandat Dunia Usaha untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial, yang dapat dilakukan perusahaan dalam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan dapat berupa program yang menunjang: (a) sarana dan prasarana pendidikan fomal dan nonformal, (b) sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, (c) fasilitas khusus atau fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat miskin sekitar perusahaan.

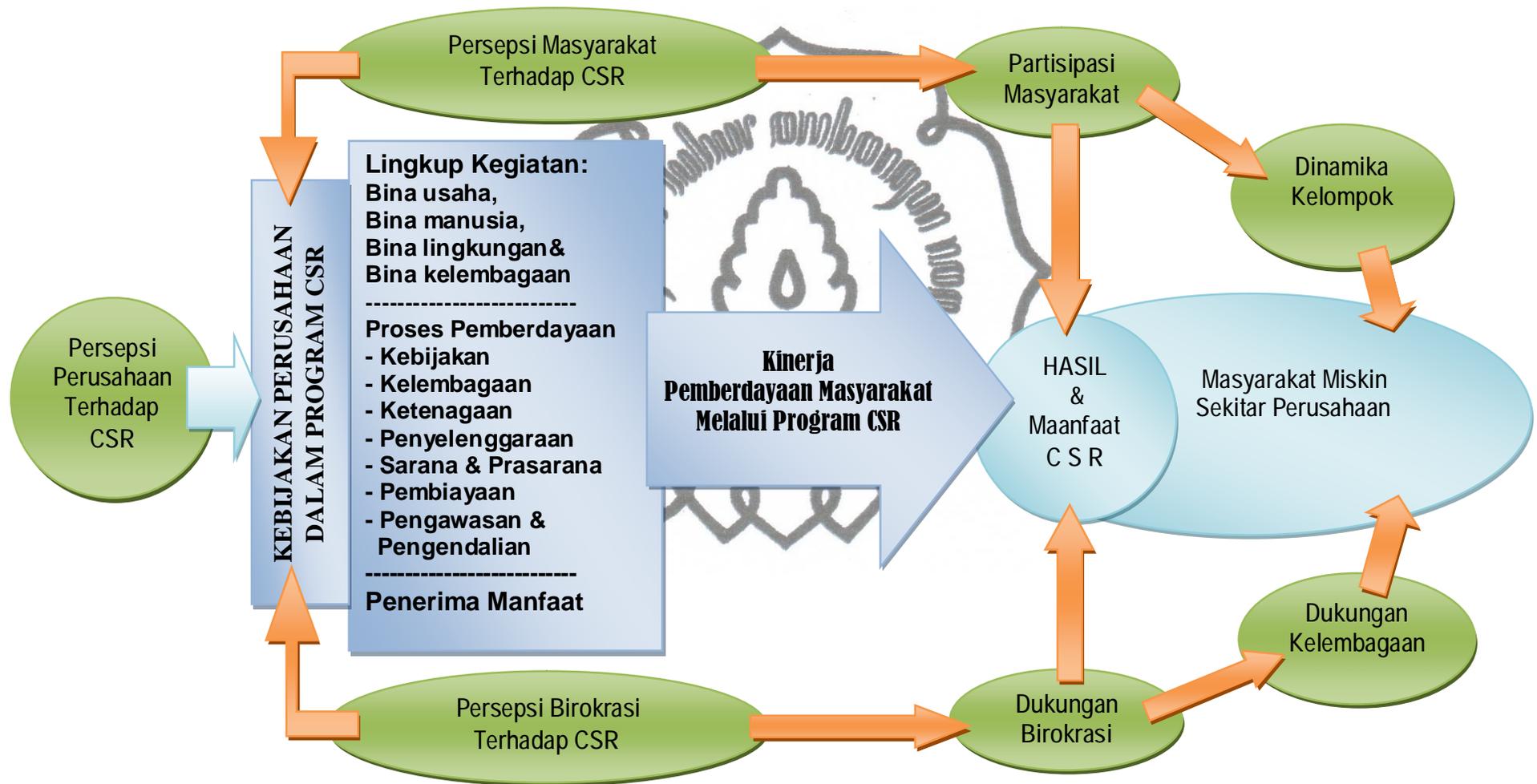
Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program *CSR* dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat miskin sekitar perusahaan, karakteristik lingkungan fisik, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat miskin sekitar perusahaan, karakteristik tenaga pendampingan. Hubungan antara program *CSR* dengan pemberdayaan masyarakat miskin adalah memungkinkan masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, program *CSR* dapat memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampu-

commit to user

an dan kemandirian, dalam hal ini mandiri dalam merencanakan kegiatan, mandiri dalam pelaksanaan kegiatan, dan mandiri dalam pengambilan keputusan, yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis hubungan keterkaitan antara berbagai komponen variabel yang telah diuraikan di atas adalah teori pemberdayaan, dengan lingkup kegiatan Bina Usaha, Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan, serta proses pelaksanaan pemberdayaan meliputi: Kebijakan, Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian, yang digambarkan pada Gambar 2.3. berikut ini.





Gambar 2.3: Kerangka Pikir Penelitian